

**ANALISIS DISPARITAS SPASIAL DAN
SEKTORAL
STUDI KASUS DI PROPINSI PAPUA**



TESIS
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Jonathan Cosmus Karay
C4B000113

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Pebruari
2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

TESIS
ANALISIS DISPARITAS SPASIAL DAN SEKTORAL
STUDI KASUS DI PROPINSI PAPAUA

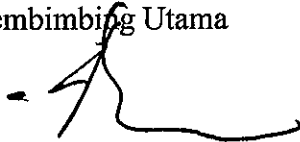
disusun oleh

Jonathan Cosmus Karay
C4B000113

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 7 Pebruari 2003
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Miyasto, SU

Anggota Penguji



Dr. Syafrudin Budiningharto, SU

Pembimbing Pendamping



Drs. Nugroho SBM, MT



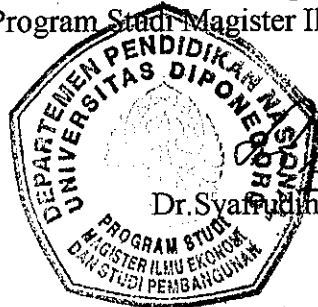
Dr. Waridin



Drs. Mulyohendarto, MSP

Semarang, 28 Februari 2003

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. Syafrudin Budiningharto, SU

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Pebruari 2003



Jonathan Cosmus Karay

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	22103/T/microp/ ei
Tgl.	15 10 03

MOTTO

" Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati."

(Yeremia 29 : 11 - 13)

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan kepada :
- Isteriku terkasih : Marthina Rahayu
- Anak-anakku tersayang : William Socrates dan Jeni Beatrix

ABSTRACT

It is well recognized that there was an investment allocation gap among regencies in Papua Province. Some regencies, such as Fak-Fak, Sorong and Jayapura, show a reasonably percentage of investment realization. In addition, their contribution to Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Papua Province is also fairly significant. These facts have shown that investment activities within these three regencies have been rapidly growing whereas others are still underdeveloped. The economic growth disparity has caused the regencies with economic activity concentration seem more developed and advanced whereas other regencies have been left behind in terms of development activities. In addition, the disparity also happens within economic sectors. This disparity results in some subsistent regions, such as Jayawijaya, Paniai and Yapen Waropen have not been changed yet so that their quality of life is still underdeveloped.

The objective of the study is to analyze factors affecting regional investment allocation disparity, economic growth inter-regencies and inter-economic sectors within Papua Province. This study makes use of time series data of 1986-2000. The data has been gathered from Central Statistics Bureau of Papua Province, Bank of Indonesia Papua Branch and Regional Investment and Promotion Agency for Papua Province. Multiple Regression of Logarithmic natural is utilized and equipped by other analyses such as Pearson coefficient correlation, Standard Deviation, Williamson Indexes, Klassen Typologies, and Location Quotient.

The findings of the study suggest that saving rate, Incremental Capital Ratio (ICOR) and interest rate give an impact on the disparity of investment allocation in Papua Province. These findings imply that the increase of 1% the saving rate and of 1% ICOR would result in increase in investment of 0.567 % and 0.692 % respectively. Meanwhile, the interest rate negatively affects the investment disparity, i.e. 1% of the increase in interest rate would reduce 2.068% of the investment allocation disparity. In addition, the economic growth disparity measured by 0.736 (74%) of Pearson correlation coefficient shows that there is a strong and positive relationship between standard deviation of investment allocation and Williamson Index. This relationship implies that a wider gap of investment allocation would result in a wider disparity of economic growth.

Other factors caused investment allocation gap are identified by inter-regencies investment allocation, differences of factor endowment owned by the regencies and the provision of infrastructures. By utilizing analysis of Klassen Typologies, it is suggested that there are 4 regional classifications: Rapid Growth Region: Fak-Fak; Retarded Region : Jayapura, Sorong, Biak Numfor; Growing Region : Manokwari and Merauke; Relatively Backward Region: Jayawijaya, Paniai and Yapen Waropen.

By using Location Quotient analysis, this study suggests that every sector could be developed in each region. However, sector analysis identifies that the disparities within transportation and communication sectors are the highest with 1.54 of standard deviation whereas mining and quarrying sectors are the lowest with 0.55 standard deviation.

To improve the development distribution in Papua Province, it is suggested that fund allocation distribution from the province should be directed to the under-developed regencies and it is needed stimulation in the provincial level by constructing inter-regencies development programs to avoid the programs overlapping.

ABSTRAKSI

Kondisi alokasi Investasi antar kabupaten di Propinsi Papua menunjukkan masih terjadinya kesenjangan. Beberapa kabupaten seperti Fak-Fak, Sorong, Jayapura memperlihatkan persentase realisasi investasinya cukup tinggi. Disamping itu kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Papua juga cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi di ketiga kabupaten tersebut tumbuh pesat, sedangkan kabupaten lainnya rendah. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten menyebabkan kabupaten lain tertinggal dalam pembangunannya, sehingga nampak bahwa kabupaten dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih maju dan berkembang. Di samping itu, disparitas juga terjadi di berbagai sektor ekonomi. Disparitas tersebut menyebabkan beberapa daerah subsisten seperti Jayawijaya, Paniai dan Yapen Waropen masih belum mampu berkembang sehingga kualitas hidup masyarakat masih memprihatinkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi disparitas alokasi investasi daerah, disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan antar sector ekonomi di Propinsi Papua. Data yang digunakan adalah runtut waktu (time series) sejak periode 1986 – 2000, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Papua, Bank Indonesia Cabang Jayapura serta Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Papua. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan pendekatan logaritma natural, koefisien korelasi Pearson, Deviasi Standar, Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Location Quotient.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat tabungan, incremental capital output ratio (ICOR) dan suku bunga berpengaruh terhadap disparitas alokasi investasi di Propinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tabungan dan ICOR sebesar 1 persen akan menyebabkan berubahnya investasi sebesar 0,567 persen dan 0,692 persen. Suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi dimana perubahan sebesar 1 persen akan menyebabkan investasi turun sebesar 2,068 persen. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten yang diukur dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,736 (74 persen) yang menunjukkan hubungan kuat dan positif antara Deviasi Standar alokasi investasi dan Indeks Williamson, dimana semakin timpang alokasi investasi maka akan menyebabkan juga disparitas dalam pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor lain penyebab ketimpangan investasi adalah alokasi investasi antar kabupaten, perbedaan sumber daya alam antarkabupaten dan ketersediaan infrastruktur . Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen diperoleh 4(empat) klasifikasi daerah : Daerah Maju dan Tumbuh Cepat adalah Fak-Fak; Daerah Maju Tapi Tertekan meliputi Jayapura, Sorong dan Biak Numfor; Daerah Berkembang Cepat meliputi Manokwari dan Merauke; Daerah Relatif Tertinggal meliputi Jayawijaya, Paniai dan Yapen Waropen.

Dengan menggunakan analisa Location Quotient nampaknya hampir semua sektor ekonomi dapat dikembangkan oleh setiap kabupaten. Dilihat Dari analisis sektoral, ketimpangan antar sektor yang paling tinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai deviasi standar 1,54 dan yang terendah pada sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai deviasi standar 0,55.

Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Propinsi Papua, distribusi pengalokasian dana dari Pemerintah Propinsi harus banyak mengarah kepada kabupaten yang tertinggal pembangunannya serta perlu adanya stimulasi pada tingkat propinsi melalui penyusunan keselarasan program-program pembangunan antar kabupaten.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji, sembah dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus atas penyertaan, berkat, rahmat dan Kasihnya kepada penulis sehingga tesis ini dapat dirampungkan.

Tesis ini menelaah penelitian tentang Analisis Disparitas Spasial dan Sektoral (Studi Kasus di Propinsi Papua). Selama perancangan, pelaksanaan penelitian hingga bimbingan dan penulisan tesis, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, maka sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU, selaku Direktur Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Miyasto, SU, sebagai pembimbing utama yang telah banyak membantu, membimbing, mengoreksi dan berkorban untuk penulis yang semua itu tidak akan pernah penulis lupakan.
3. Bapak Drs. Nugroho, SBM, MT, selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan sebagian waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan sehingga bermanfaat sekali dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Drs.G.M.Satya MSc, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Jayapura yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
5. Tim pengelola bea siswa UBCHEA di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga secara khusus Bapak Alex da'Costa yang telah melayani kebutuhan beasiswa selama penulis studi sampai dengan selesainya.
6. Bapak Gubernur Propinsi Papua dan stafnya yang telah memberikan beasiswa selama penulis studi sampai dengan selesainya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta rekan-rekan mahasiswa angkatan I Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang melalui diskusi baik di kampus maupun di luar kampus yang telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis, juga bagian Admisi yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalani studi.
8. Para Kepala Dinas Instansi terkait di Propinsi Papua yang pada kesempatan ini tidak dapat disebutkan satu persatu, beserta stafnya yang telah membantu memberikan data yang penulis butuhkan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Bapak Suparno dan Ibu Lilishandayani yang telah memberikan tumpangan bagi penulis selama tinggal dan studi di Semarang.

10. Isteriku tercinta Marthina Rahayu dan Anak-Anakku tersayang, William Socrates dan Jeni Beatrix yang telah rela berkorban berpisah selama penulis menjalani studi, serta dukungan doa yang tak putus-putus hingga penulis menyelesaikan studi.
11. Bapak A.Karay dan Ibu.M.Yaukwart selaku orangtua penulis dan Ibu Sutini selaku Mertua yang tak henti-hentinya mendukung penulis dalam doa.
12. Bapak Mahmoed (Almarhum) selaku Mertua, semasa hidup selalu memberikan dorongan dan topangan doa sejak penulis menjalani studi di MIESP Undip Semarang.

Amat disadari tesis ini mengandung kekurangan, karena itu koreksi dan saran masih dibutuhkan penulis untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Mudah-mudahan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Pebruari 2003

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1. Teori Umum Pertumbuhan	14
2.1.1. Sisi Permintaan Agregat	15
2.1.2. Sisi Penawaran Agregat	17
2.2. Teori Pertumbuhan Harrod – Domar	20
2.3. Alokasi Investasi Regional	22
2.4. Penelitian Terdahulu	27
2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis	30
2.6. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Lokasi Penelitian	32
3.2. Metode Pengumpulan Data	32
3.3. Metode Analisis	33
3.3.1. Alat Analisis	33
3.3.2. Prosedur Analisis	37
3.4. Definisi Operasional	43
BAB IV GAMBARAN UMUM PROPINSI PAPUA	45
4.1. Letak dan Luas Wilayah	45
4.2. Kependudukan	47
4.3. Perekonomian	49
4.4. Investasi	51
4.5. Tabungan	53

BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	55
5.1.	Analisis Disparitas Alokasi Investasi Daerah di Propinsi Papua	55
5.1.1.	Uji Penyimpangan Klasik	56
5.1.2.	Hasil Persamaan Regresi	59
5.1.3.	Pengujian Hipotesis	61
5.1.4.	Hubungan Disparitas Alokasi Investasi dan Indeks Williamson	63
5.1.5.	Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan lainnya	67
5.1.6.	Implikasi Hasil Penelitian	71
5.2.	Disparitas Spasial	73
5.3.	Disparitas Sektoral	79
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	84
6.1.	Kesimpulan	84
6.2.	Saran	86
6.3.	Keterbatasan Penelitian	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Persentase Realisasi Investasi Swasta di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000	5
Tabel 1.2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten terhadap PDRB Propinsi ADH Konstan Tahun 1987 – 1986	6
Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Propinsi Papua ADH Konstan 1993, Tahun 1995 – 1999	8
Tabel 3.1. Pembagian Perkembangan Daerah menurut masing-masing Tipologi	36
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten di Propinsi Papua	47
Tabel 4.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Propinsi Papua Tahun 1999	48
Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Tahun 1986 – 2000	51
Tabel 4.4. Realisasi Investasi Swasta di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000	52
Tabel 4.5. Penghimpunan Dana dalam Rupiah dan Valuta Asing Tahun 1986 – 2000	54
Tabel 5.1. Perbandingan Nilai R^2	56
Tabel 5.2. Signifikansi Uji Glejser	58
Tabel 5.3. Nilai t hitung	62
Tabel 5.4. Hubungan Disparitas Alokasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	63
Tabel 5.5. Persentase Realisasi Investasi Swasta di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000	66
Tabel 5.6. Sumber Daya Alam menurut Kabupaten Tahun 2000	69
Tabel 5.7. Ketersediaan Infrastruktur menurut Kabupaten Tahun 2000	70

Tabel 5.8.	Pendapatan Perkapita Antar Kabupaten dan Indeks Williamson di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000 ..	74
Tabel 5.9.	Klasifikasi Kabupaten di Propinsi Papua menurut Tipologi Klassen Tahun 1986 – 2000	76
Tabel 5.10.	Koefisien Location Quotient menurut Kabupaten di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000	82
Tabel 5.11.	Distribusi Persentase PDRB Propinsi Papua ADH Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1986 – 2000	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat di dalam Posisi Ekonomi Makro yang seimbang	15
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Penelitian	31
Gambar 5.1. Uji Heteroskedastisitas	57
Gambar 5.2. Hasil Pengujian Durbin Watson	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Mentah Penelitian
- Lampiran 2. Data Mentah Dalam Format Log Natural
- Lampiran 3. Regresi Utama
- Lampiran 4. Auxiliary Regression 1
- Lampiran 5. Auxiliary Regression 2
- Lampiran 6. Auxiliary Regression 3
- Lampiran 7. Autocorelation Test
- Lampiran 8. Heteroscedasticity Test by Chart
- Lampiran 9. Heteroscedasticity Test by Gleijser Test
- Lampiran 10. Realisasi Investasi Swasta di Propinsi Papua Tahun 1986-2000
- Lampiran 11. JumlaJ Penduduk menurut Kabupaten di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 12. Pendapatan Perkapita menurut Kabupaten di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 13. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Sektor Ekonomi di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 14. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten di Propinsi Papua tahun 1986 – 2000
- Lampiran 15. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten di Propinsi Papua Tahun 1986 – 2000

- Lampiran 16.1. Hasil Perhitungan Disparitas pertumbuhan ekonomi dengan Model Analisis Indeks Williamson Kabupaten Merauke dan Jayawijaya Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 16.2. Hasil Perhitungan Disparitas pertumbuhan ekonomi dengan Model Analisis Indeks Williamson Kabupaten Jayapura dan Paniai Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 16.3. Hasil Perhitungan Disparitas pertumbuhan ekonomi dengan Model Analisis Indeks Williamson Kabupaten Fak-Fak dan Sorong Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 16.4. Hasil Perhitungan Disparitas pertumbuhan ekonomi dengan Model Analisis Indeks Williamson Kabupaten Manokwari dan Yapen Waropen Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 16.5. Hasil Perhitungan Disparitas pertumbuhan ekonomi dengan Model Analisis Indeks Williamson Kabupaten Biak Numfor Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 17.1. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Model Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Merauke dan Jayawijaya Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 17.2. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Model Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Jayapura dan Paniai Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 17.3. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Model Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Fak-Fak dan Sorong Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 17.4. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Model Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Manokwari dan Yapen Waropen Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 17.5. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Model Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Biak Numfor Tahun 1986 – 2000

- Lampiran 18.1. Hasil Perhitungan Potensi Ekonomi Secara Sektoral dengan Model Analisa Location Quotient Kabupaten Merauke dan Jayawijaya Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 18.2. Hasil Perhitungan Potensi Ekonomi Secara Sektoral dengan Model Analisa Location Quotient Kabupaten Jayapura dan Paniai Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 18.3. Hasil Perhitungan Potensi Ekonomi Secara Sektoral dengan Model Analisa Location Quotient Kabupaten Fak-Fak dan Sorong Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 18.4. Hasil Perhitungan Potensi Ekonomi Secara Sektoral dengan Model Analisa Location Quotient Kabupaten Manokwari dan Yapen Waropen Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 18.5. Hasil Perhitungan Potensi Ekonomi Secara Sektoral dengan Model Analisa Location Quotient Kabupaten Biak Numfor Tahun 1986 – 2000
- Lampiran 19.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan per Sektor Ekonomi Kabupaten Merauke dan Jayawijaya Tahun 1986 - 2000
- Lampiran 19.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan per Sektor Ekonomi Kabupaten Jayapura dan Paniai Tahun 1986 - 2000
- Lampiran 19.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan per Sektor Ekonomi Kabupaten Fak-Fak dan Sorong Tahun 1986 - 2000
- Lampiran 19.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan per Sektor Ekonomi Kabupaten Manokwari dan Yapen Waropen Tahun 1986 - 2000
- Lampiran 19.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan per Sektor Ekonomi Kabupaten Baik Numfor Tahun 1986 - 2000

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Semenjak tahun 1977 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa perekonomian nasional. Berbagai kebijaksanaan ekonomi dan moneter yang diterapkan pemerintah sampai dengan tahun 2002, untuk perbaikan (*recovery*) ekonomi nasional, nampaknya mulai membuahkan hasil, meskipun masih jauh dari harapan. Kebijakan seperti memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan, serta menekan laju inflasi, sedikit demi sedikit nampak membuahkan hasil. Secara lebih nyata, hasil pembangunan telah berhasil menunjukkan desa terisolir dan mengurangi jumlah penduduk miskin, yang sampai akhir tahun 1999 jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi sekitar 37,50 juta jiwa, sementara tahun 1998 tercatat sekitar 49,5 juta jiwa. Setelah mengalami kontraksi hebat pada akhir 1997/ awal 1998 akibat krisis, proses pembangunan ekonomi di Indonesia terasa berhenti bahkan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -13,01 persen pada tahun 1998. (BPS,2000,hal3).Ekonomi Indonesia seperti halnya di negara-negara lain di kawasan ASEAN, mulai mengalami pertumbuhan positif, meskipun sebenarnya masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya. Menurut para pakar ekonomi,

sendiri dalam arti sebenarnya baru akan terwujud sekitar tiga sampai lima tahun lagi (BPS Jakarta,2000:3)

Seiring dengan jalannya proses reformasi di Indonesia, ancaman disintegrasi bangsa Indonesia semakin tampak di depan mata. Ancaman disintegrasi tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia selama Orde Lama dan Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur. Masalah ketertinggalan Kawasan Indonesia Timur ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang kontradiktif dengan potensi alam yang melimpah, dan jumlah kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat.(Suahasil Nazara,1994:19)

Ketimpangan pertumbuhan antar daerah ini merupakan masalah nasional yang mendesak untuk dipecahkan. Akibat ketimpangan tersebut dapat dirasakan baik dalam kaitan ekonomi, maupun dalam kaitan sosial politik. Dalam kaitan ekonomi, kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang ternyata sangat berpengaruh dalam memicu dan memacu pertumbuhan regional (Badrudin Rudy,1992:2). Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Menurut Mubyarto, bahwa isu ketidakadilan dalam pembangunan daerah di Indonesia adalah tidak meratanya distribusi hasil-hasil pembangunan sehingga daerah-daerah lain di Indonesia sangat tertinggal. (Mubyarto dalam

(Mubyarto dalam Badrudin Rudy,1999:171). Isu tersebut menunjukkan bahwa kata keadilan/ pemerataan masih merupakan sesuatu yang sangat mahal di Indonesia dan hal itulah yang sangat potensial sebagai sumber kemunculan disintegrasi bangsa. Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antar wilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah (propinsi) dengan kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada.

Propinsi Papua dengan luas 421.981 Km², memiliki 12 kabupaten dan 2 kota, jumlah penduduk 2,165 juta jiwa (SUPAS 1999) mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk berkisar 2,6 persen pada periode 1990-2000 dan laju pertumbuhan PDRB sebesar 7% pada periode 1996-1998 (BPS Prop. Itja,1998). Kenyataan tersebut diatas cukup menggembirakan karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai diatas rata-rata nasional yaitu 7,98 pada periode yang sama (BPS Jakarta1997)

Namun dari pengalaman pelita-pelita yang lalu ternyata Propinsi Papua belum berhasil menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Bahkan hasil-hasil pembangunan yang paling menonjol adalah terjadinya kesenjangan antara

dengan perkotaan, antara satu sektor dengan sektor yang lain, serta kesenjangan tingkat pendapatan, (Solossa,JP,2001).

Pembangunan di Propinsi Papua dihadapkan pada 2 permasalahan spesifik, yaitu:

Pertama, Disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah/kabupaten. Pertumbuhan ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan investasi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan kegiatan investasi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ketimpangan ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah /kabupaten tersebut.

Secara ekonomi, investasi disuatu daerah memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat sekitar proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. .

Tabel 1.1. Persentase Realisasi Investasi Swasta di Propinsi Papua Tahun 1986 - 1996

Tahun	Merauke	Jayawijaya	Jayapura	Paniai	Fak-Fak	Sorong	Manokwari	Yapen Waropen	Biak Numfor	Total
1986	5,45	3,47	13,30	2,59	41,07	18,84	4,49	4,06	6,78	100
1987	5,86	2,57	13,25	2,35	46,95	18,98	3,97	2,49	3,58	100
1988	5,05	2,28	15,64	2,66	46,69	17,28	4,43	2,54	3,41	100
1989	4,83	2,87	14,91	3,19	44,10	17,14	5,35	3,46	4,15	100
1990	6,08	3,81	16,41	4,06	39,73	16,63	5,29	3,57	4,41	100
1991	5,75	4,71	16,30	4,11	33,01	20,56	6,28	4,29	4,99	100
1992	6,16	4,98	20,32	5,39	18,55	24,35	7,02	5,09	8,14	100
1993	6,28	5,26	16,31	4,26	26,71	19,85	6,53	4,59	7,33	100
1994	6,01	5,11	17,82	5,28	26,61	19,17	7,89	4,79	7,34	100
1995	4,87	3,48	14,96	3,93	37,51	18,89	6,40	4,01	5,96	100
1996	5,07	3,590	15,83	4,52	30,55	20,50	6,71	4,32	8,89	100
Rata2	5,58	3,83	15,91	3,85	35,59	19,29	5,85	3,93	5,91	100

Sumber : Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Papua (data diolah)

Tabel 1.2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi Papua ADH Konstan Tahun 1987 - 1996

Kabupaten	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Rata-Rata
1. Merauke	4,45	6,07	6,26	6,43	6,43	6,44	6,73	6,81	6,29	6,42	6,233
2. Jayawijaya	7,31	7,06	7,05	6,57	7,07	6,89	6,97	5,29	4,55	4,70	6,346
3. Jayapura	14,21	14,45	16,22	17,03	6,30	6,36	6,58	5,60	5,01	4,81	9,657
4. Paniai	6,50	6,39	6,43	5,91	6,65	6,65	6,95	5,44	5,68	5,74	6,234
5. Fak-Fak	13,48	13,56	14,32	12,27	31,93	33,81	33,39	45,24	51,25	52,58	30,183
6. Sorong	41,00	39,28	35,28	36,89	27,43	25,83	25,03	16,54	13,43	12,42	27,313
7. Manokwari	5,24	5,13	5,55	5,65	5,63	5,56	5,73	6,90	6,30	6,08	5,777
8. Yapen Waropen	2,50	2,63	2,71	2,80	2,82	2,82	2,94	3,35	3,08	3,00	2,865
9. Biak Numfor	5,31	5,54	6,18	6,45	5,74	5,64	5,68	4,83	4,41	4,25	5,403
Propinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Deviasi Standar	11,89	11,26	10,05	10,55	10,66	10,86	10,54	13,35	15,34	15,78	10,17

Sumber : Pendapatan Regional Propinsi Irian Jaya 1987 - 1996.

Keterangan : 1987 s/d 1992 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1983
1993 s/d 1996 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Kedua, adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi baik antar kabupaten maupun antar sektor. Keadaan ini terutama dirasakan oleh kabupaten yang belum dapat mengelola sumberdaya alamnya secara optimal karena terbatasnya sarana, modal, sumberdaya manusia, keadaan geografis, atau belum ada usaha yang bersifat nasional maupun regional untuk mengalihkan faktor-faktor produksi ke kabupaten yang tertinggal.

. Untuk melihat realisasi investasi antar kabupaten di Propinsi Papua selama periode 1986 -1996 dalam Tabel 1.1. menjelaskan bahwa persentase terbesar realisasi investasi didominasi oleh Kabupaten Fak-Fak 35,59 persen disusul Kabupaten Sorong, 19,29 persen, Kabupaten Jayapura 15,91 persen sedangkan kabupaten lainnya berada jauh dibawahnya

Selanjutnya pada Tabel 1.2. menggambarkan bahwa andil terbesar dalam pembentukan PDRB Propinsi didominasi Kabupaten Fak-Fak dengan produksi tambang tembaga yang terus meningkat, dimana kontribusinya sangat besar terhadap total PDRB Propinsi Papua sebesar 30,18 persen. Kabupaten Sorong menempati urutan kedua dengan kontribusi mencapai 27,31 persen dan urutan ketiga Kabupaten Jayapura sebesar 9,66 persen, sedangkan kontribusi kabupaten-kabupaten lainnya dibawah 7 persen. serta yang terendah adalah Kabupaten Yapen Waropen sebesar 2,87 persen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi lebih banyak mengarah pada tiga kabupaten yaitu Fak-Fak, Sorong dan Jayapura. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa angka deviasi standar pada tahun 1987 sampai 1993 terus menurun namun mulai naik sebesar 13,35 pada tahun 1994 sampai 15,78 pada

tahun 1976. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten terjadi pada tahun 1994 sampai tahun 1996.

Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Propinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 – 1999

Sektor	1995	1996	1997	1998	1999	Rata2
1. Pertanian	8,12	11,00	8,47	-7,83	5,72	5,96
2. Pertambangan dan Penggalian	32,94	16,62	3,58	35,42	-2,85	17,14
3. Industri Pengolahan	14,77	12,35	6,77	-10,57	-3,36	3,99
4. Listrik dan Air Bersih	11,95	10,50	3,73	9,23	12,36	9,67
5. Bangunan	12,46	10,05	4,78	-40,01	-9,09	-4,36
6. Perdagangan, Hotel. Dan Restoran	6,98	7,56	7,07	-4,99	7,37	4,79
7. Anggkutan dan Komunikasi	7,99	10,18	9,00	2,31	5,48	6,99
8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	7,96	10,66	11,03	27,58	-70,56	17,73
9. Jasa-Jasa	5,64	13,38	7,94	-21,75	5,77	2,49
PDRB	20,18	13,87	7,42	12,72	-3,64	9,49

Sumber : PDRB Propinsi Jaya 1999;49

Bila dilihat pertumbuhan secara lebih rinci atau pertumbuhan ekonomi menurut sektor maka tampak ada perubahan kinerja sektor-sektor ekonomi di Papua pada tahun 1999, hal itu ditunjukkan semakin banyaknya sektor/sub sektor yang tumbuh positif dibanding keadaan tahun 1998.

Dari Tabel 1.3. dapat dilihat bahwa terdapat lima sektor yang mengalami pertumbuhan positif, kelima sektor tersebut yaitu sektor pertanian, sektor Listrik dan Air bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Anggkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa-Jasa.

Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Konstruksi/Bangunan masih mengalami pertumbuhan negatif yaitu -9,09 persen, namun keadaannya masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 1998 yang mencapai minus 40,01 persen. Selanjutnya sektor pertambangan yang merupakan sektor andalan perekonomian Papua mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,85 persen. Begitu juga sektor industri khususnya industri besar sedang juga masih mengalami kontraksi sebesar 3,36 %. Sektor yang mengalami penurunan relatif tinggi adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu sebesar -70,56 persen, penurunan ini khusus terjadi di sub sektor perbankan. Tabel 1.3. diatas juga memberikan gambaran bahwa laju pertumbuhan rata-rata didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,14 persen dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 17,73 persen kemudian diikuti oleh sektor Listrik dan Air Bersih 9,67 persen dan sektor lainnya. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan pertumbuhan antar sektor ekonomi.

Berdasarkan kedua permasalahan spesifik tersebut di atas, maka apabila keadaan diatas terus dibiarkan tanpa adanya upaya untuk meneliti atau mengkaji secara mendalam penyebabnya akan menimbulkan dampak berupa :

1. Kabupaten tertentu akan mengalami kekurangan tenaga kerja karena tenaga kerja yang berpendidikan maupun yang kurang berpendidikan akan terus mengalir ke kabupaten yang terpusat konsentrasi kegiatan ekonomi. Ini berarti bahwa salah satu faktor produksi penting hilang di kabupaten.

2. Akibat butir (1), kabupaten akan semakin sulit mengembangkan sektor tradisional ke sektor modern, atau semakin sulit mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis pertanian ke industri atau jasa. Hal ini sangat penting untuk menjawab persoalan ketimpangan ekonomi dan sektoral.
3. Akibat butir (2), tingkat pendapatan masyarakat semakin rendah. Ini berarti perkembangan pasar output semakin lemah dan selanjutnya berarti semakin kecil perkembangan investasi di kabupaten tertentu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam mengeksploitir potensi masing-masing kabupaten mempunyai kesulitan-kesulitan dalam sarana, teknologi, modal maupun sumberdaya manusia. Untuk beberapa kabupaten tertentu yang menjadi kesulitan utama adalah tidak adanya usaha yang bersifat nasional maupun regional untuk mengalihkan faktor-faktor produksi ke daerah tersebut. Kabupaten lain mungkin terhambat oleh kondisi lokasi yang kurang menguntungkan, sehingga potensi yang ada tidak memiliki nilai ekonomis.

Dalam rangka untuk perumusan kebijaksanaan pembangunan dan pengembangan Propinsi Papua ke masa depan itulah, maka "*Penelitian Analisis Disparitas Spasial Dan Sektoral (Studi Kasus di Propinsi Papua)*" perlu diadakan.

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan di Propinsi Papua mempunyai permasalahan tersendiri yang sangat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Jelas bahwa permasalahan pembangunan tersebut tidak selalu sama dari satu kabupaten lain, dan tergantung dari potensi pembangunan dan kondisi ekonomi yang dimiliki setiap kabupaten.

Ada dua pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini:

Pertama, disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua.

Kondisi alokasi investasi antar kabupaten di Papua menunjukkan masih terjadinya kesenjangan. Beberapa kabupaten Seperti Fak-Fak, Sorong, Jayapura memperlihatkan dominasi kontribusi mereka terhadap PDRB Propinsi Papua. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kegiatan investasi di daerah/kabupaten tersebut tumbuh pesat, sedangkan daerah/kabupaten lainnya rendah. Meskipun tingkat pertumbuhan PDRB sebesar 7 persen pada periode 1996 – 1998 cukup mengesankan, namun pada tingkat kabupaten kesenjangan pembangunan ekonomi masih terjadi. Maka tanpa mengklaim bahwa alokasi investasi sebagai penyebabnya, namun investasi dalam pemikiran klasik merupakan salah satu determinan bagi pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, terdapat disparitas pertumbuhan ekonomi baik antar kabupaten maupun antar sektor ekonomi.

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten menyebabkan kabupaten lain tertinggal dalam pembangunannya. Sehingga nampak bahwa kabupaten

dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan kabupaten yang aktivitas ekonomi kurang.

Pada Tabel 1.3. menunjukkan kesenjangan antar sektor ekonomi terjadi pada sektor-sektor : keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 17,73 persen ; pertambangan dan penggalian 17,14 persen; listrik dan air bersih 9,67 persen ; angkutan dan komunikasi 6,99 persen ; pertanian 5,96 persen ; perdagangan hotel dan restoran 4,79 persen ; industri pengolahan 3,99 persen ; jasa-jasa 2,49 persen dan bangunan -4,36 persen . Kesenjangan ini juga menyebabkan perekonomian yang subsistens masih belum dapat diubah di kabupaten tertentu sehingga kualitas hidup masyarakatnya masih memprihatinkan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua.
- 2 Menganalisis disparitas pertumbuhan ekonomi baik antar kabupaten maupun antar sektor ekonomi di Propinsi Papua.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan Ilmu Ekonomi Regional khususnya yang berhubungan dengan kajian mengenai pertumbuhan ekonomi di Propinsi Papua.

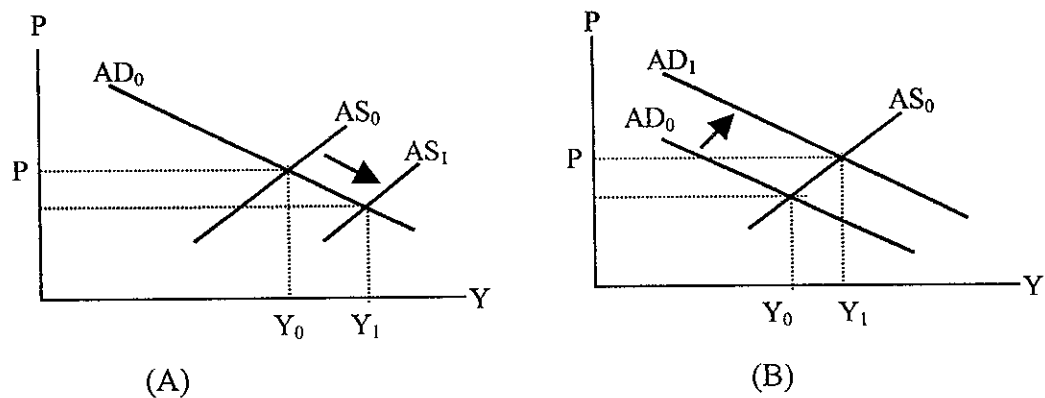
2. Sebagai landasan atau bahan informasi untuk penelitian serupa maupun lanjutan baik di Papua maupun di daerah lain
3. Sebagai bahan informasi bagi pejabat pengambil keputusan/kebijakan dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Papua guna dijadikan sebagai salah satu dasar bagi penggarisan keputusan atau menyangkut pembangunan daerah Papua kedepan.

BAB. II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Teori Umum Pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregat dan sisi penawaran agregat. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1, titik perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat adalah titik keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) yang menghasilkan suatu jumlah *output* agregat (PDB) tertentu dengan tingkat harga umum tertentu. *Output* agregat yang dihasilkan didalam suatu ekonomi (atau negara) selanjutnya membentuk pendapatan nasional. Apabila pada periode awal ($t = 0$) output adalah Y_0 , maka yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah apabila pada periode berikutnya output = Y_1 , dimana $Y_1 > Y_0$. Melalui analisis gambar ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan oleh pergeseran kurva penawaran (AS_1) sepanjang kurva permintaan (bagian A) atau pergeseran kurva permintaan (AD_1) sepanjang kurva penawaran (bagian B). (*Tulus Tambunan 2001;41*)



Gambar 2.1

Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat di Dalam Posisi Ekonomi Makro yang seimbang

2.1.1 Sisi Permintaan Agregat (AD).

Dari sisi permintaan agregat, pergeseran kurva AD ke kanan yang mencerminkan permintaan didalam ekonomi meningkat bisa terjadi karena pendapatan agregat (PN) yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan, dan pemerintah meningkat. Sisi permintaan agregat (penggunaan PDB) terdiri atas empat komponen, yakni konsumsi rumah tangga (C), investasi domestik bruto (pembentukan modal tetap dan perubahan stok) dari sektor swasta dan pemerintah (I_b), konsumsi/pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto, yaitu ekspor barang dan jasa (X) minus impor barang dan jasa (M). Sisi permintaan agregat di dalam suatu ekonomi bisa digambarkan dalam suatu model ekonomi makro sederhana sebagai berikut :

$$Y = C + I_b + G + X - M \quad (1)$$

$$C = cY \quad (2)$$

$$I_b = -ir + I_a \quad (3)$$

$$G = G_a \quad (4)$$

$$X = X_a \quad (5)$$

$$M = mY + M_a \quad (6)$$

Persamaan (1) menggambarkan keseimbangan antara sisi penawaran agregat (total output/PDB) dan sisi permintaan agregat yang terdiri atas empat komponen tersebut. Persamaan (2) adalah konsumsi rumah tangga yang jumlahnya ditentukan oleh tingkat pendapatan dan "c" merupakan koefisien konsumsi (*marginal propensity to consume*) dengan nilai positif antara 0 dan 1, yang artinya semakin tinggi pendapatan semakin besar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Persamaan (3) menunjukkan bahwa nilai atau jumlah investasi (misalnya dalam jumlah proyek) sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga di dalam negeri, selain juga oleh sejumlah faktor-faktor lain yang bersifat otonom (I_a). Semakin tinggi suku bunga, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap (tidak berubah), semakin mahal biaya (*opportunity cost*) investasi, semakin kecil jumlah investasi di dalam perekonomian yang dicerminkan oleh tanda negatif di depan koefisien "r" (positif). Persamaan (4) adalah pengeluaran pemerintah yang sifatnya otonom, dalam arti besar kecilnya pengeluaran pemerintah ditentukan oleh faktor-faktor lain (diantaranya faktor non politik) di luar model tersebut. Demikian juga halnya dengan persamaan (5), karena Indonesia adalah negara kecil di lihat dari pangsa perdagangan luar negerinya di dalam total volume perdagangan dunia, maka pertumbuhan ekspor Indonesia ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, seperti permintaan dari luar negeri, di luar pengaruh dari kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan variabel-variabel ekonomi domestik lainnya, seperti pendapatan nasional. Tingkat suku bunga, dan inflasi. Persamaan (6) menggambarkan bahwa impor ditentukan oleh tingkat pendapatan di dalam negeri, selain juga faktor-faktor otonom.

Semakin tinggi pendapatan masyarakat di Indonesia, semakin besar permintaan pasar dalam negeri terhadap impor yang terdiri atas barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan kegiatan proses produksi di dalam negeri.

2.1.2. Sisi Penawaran Agregat (AS).

Ada dua aliran pemikiran (teori) mengenai pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penawaran agregat (produksi), yakni teori neoklasik dan teori modern. Dalam kelompok teori neoklasik, faktor-faktor produksi dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja dan kapital (modal). Kapital bisa dalam bentuk *finance* atau barang modal (seperti mesin). Penambahan jumlah tenaga kerja dan kapital dengan faktor-faktor lain, seperti tingkat produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut atau secara keseluruhan tetap (tidak berubah), akan menambah output yang dihasilkan. Persentase pertumbuhan output bisa lebih besar (*increasing return to scale*), lebih kecil (*decreasing return to scale*), atau sama (*constant return to scale*) dibandingkan persentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut.

Dalam kelompok teori neoklasik, peranan teknologi terhadap pertumbuhan tidak mendapat perhatian secara eksplisit, walaupun pada dekade 1950-an dan 1960-an sudah mulai ada pembahasan mengenai dampak positif dari progres teknologi. Kelompok teori neoklasik lebih memusatkan perhatian terhadap efek positif dari akumulasi kapital (investasi) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori modern, faktor-faktor produksi yang dianggap sama krusialnya tidak hanya tenaga kerja dan modal, tetapi juga perubahan teknologi (yang terkandung di dalam barang modal), energi, bahan baku, dan material. Selain itu faktor-faktor lain yang oleh teori-teori modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan (*the rule of law*), stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah), birokrasi dan dasar tukar internasional (*terms of trade*).

Dilihat dari kerangka pemikiran kelompok teori modern mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada sejumlah perbedaan yang mendasar dengan kelompok teori neoklasik. Diantaranya adalah yang mencakup tenaga kerja, kapital (barang modal), dan kewirausahaan. Dalam hal tenaga kerja, dalam kelompok teori modern aspek kualitasnya menjadi lebih penting daripada aspek kuantitasnya. Aspek kualitas tenaga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga kondisi kesehatannya. Demikian juga halnya dengan kapital, kualitasnya (yang mencerminkan progres teknologi) lebih penting daripada kuantitasnya (akumulasi kapital). Juga kewirausahaan, termasuk kemampuan seseorang untuk melakukan inovasi, merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebenarnya perdebatan di seputar persoalan pertumbuhan ekonomi telah berlangsung sejak akhir dekade 1940-an, diawali dengan teori dari Keynes dan Harrod dan Domar. Pada awal perdebatan (teori neoklasik) hanya dua faktor produksi yang dianggap sangat penting bagi pembentukan *Output*

(Y), yakni barang modal (K) dan manusia atau tenaga kerja (L). Teori pertumbuhan neoklasik ini didasarkan pada fungsi produksi *Cobb- Douglas*, yaitu: (Tulus Tambunan 2001;45)

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \quad (7)$$

Dimana:

Y_t = tingkat produksi (output) pada periode t

T_t = tingkat teknologi pada periode t

K_t = jumlah stock modal pada periode t

L_t = jumlah tenaga kerja pada periode t

α dan β masing-masing produktivitas tenaga kerja dan modal.

Selanjutnya fungsi produksi ini dikembangkan dengan menambah dua faktor produksi lain yakni *input* antara atau material produksi (M) dan energi (E). Akan tetapi, model pertumbuhan ekonomi ini yang didasarkan pada teori pertumbuhan neoklasik memiliki suatu kelemahan serius. Model tersebut tidak bisa menerangkan kenapa di banyak negara di dunia pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan berdasarkan model ini. Model pertumbuhan neoklasik hanya melihat pada satu sumber pertumbuhan saja, yakni kontribusi dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi.

Dalam model pertumbuhan neoklasik, teknologi dan ilmu pengetahuan dianggap konstan atau tidak (kurang) penting (dianggap suatu koefisien yang konstan) sehingga produktivitas tenaga kerja dan kapital tidak bisa ditingkatkan.

2.2. Teori Pertumbuhan Harrod - Domar.

Dengan alasan kelemahan model pertumbuhan neoklasik yang dibahas di atas, maka sebagai alternatif muncul model pertumbuhan ekonomi modern atau *endogenous growth model* yang memasuki aspek-aspek endogenitas dan eksternalitas di dalam proses pembangunan ekonomi. Sifat keberadaan tidak lagi *given*, tetapi merupakan salah satu faktor produksi yang dinamis. Demikian juga halnya dengan faktor manusia. Tenaga kerja didalam fungsi produksi tidak lagi merupakan suatu faktor yang eksogen, tetapi bisa "berkembang" mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan menjadi faktor-faktor pertumbuhan yang penting.

Salah satu model pertumbuhan neoklasik yang bisa di "*endogenous*"-kan dan umum digunakan di dalam analisis-analisis empiris mengenai peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah model dari Harrod-Domar. (Tulus Tambunan, 2001; 47)

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi, *Pertama*, ia menciptakan pendapatan, dan *Kedua*, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal. Yang pertama dapat disebut sebagai "dampak permintaan" dan yang kedua "dampak penawaran" investasi. Dua variabel fundamental dari model ini adalah pembentukan kapital (investasi) dan ICOR (*incremental capital output ratio*). Jika $Y = \text{output}$, $K = \text{stock kapital}$, $I = \text{investasi}$, maka ICOR adalah $(\Delta K / \Delta Y)$,

penambahan kapital dibagi pertumbuhan output, sama seperti $(I / \Delta Y)$, sejak $\Delta K = 1$ dalam definisi.

Pada dasarnya teori Harrod Domar menganalisa tentang syarat-syarat apa dan keadaan bagaimana yang harus diciptakan dalam perekonomian agar tercapai suatu pertumbuhan yang cukup mantap (*steady growth*) yang dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang selalu akan memunculkan penggunaan sepenuhnya peralatan modal dalam siklus perekonomian.

Model Harrod Domar ini adalah suatu modifikasi yang didasari pada model - model pertumbuhan masing-masing dari Domar dan Harrod. Model Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi $(\Delta I/I)$. Di dalam model, investasi (I) ditetapkan harus tumbuh atas suatu prosentase yang konstan, sejak *marginal propensity to save*, yakni rasio dari pertumbuhan tabungan (S) terhadap peningkatan pendapatan (Y), dan ICOR keduanya konstan. Sedangkan penekanan model Harrod lebih pada pertumbuhan pendapatan (*output*) jangka panjang (*growth path*). Di dalam modelnya, laju pertumbuhan keseimbangan (*warranted growth*) yang membuat besarnya tabungan yang direncanakan ditetapkan selalu sama dengan besarnya investasi yang direncanakan, yaitu :

$$SY_t = ICOR (Y_t - Y_{t-1}) \quad (8)$$

$$\frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y} = \frac{s}{ICOR} \quad (9)$$

Model ini tidak saja menekankan pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga pentingnya tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan investasi tersebut. Oleh karena itu, model ini sangat relevan sebagai salah satu alat analisa empiris untuk kasus Indonesia.

Selama masa orde baru telah terbukti bahwa investasi memang merupakan salah satu faktor krusial bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Terbukti juga, selama krisis ekonomi lesunya kegiatan investasi di dalam negeri membuat kondisi perekonomian nasional semakin buruk. Dengan tingkat tabungan nasional yang masih terbatas, Indonesia terpaksa menggantungkan diri pada pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA) untuk mempertahankan kegiatan investasi yang diperlukan di dalam negeri. (Tulus Tambunan, 2001; 48).

2.3. Alokasi Investasi Regional.

Investasi merupakan variabel pengeluaran penting sebagai stimulus terjadinya pembangunan ekonomi. Pemikiran-pemikiran mengenai hal ini telah menjadi topik sentral pemikiran khususnya bagi kelompok pemikir yang pro pertumbuhan seperti misalnya dinyatakan oleh model Harrod-Domar, model neo-klasik Solow-Swan hingga model pertumbuhan endogenous Paul Romer, Robert Lucas.

Dalam model-model konsep investasi meliputi konsep *physical-capital investment*, *capital investment* maupun *human investment*. Nainun pemikiran mengenai nisbah investasi dan pembangunan dalam model-model diatas masih bersifat agregat atau makro. Dalam konteks pembangunan ekonomi regional penjelasan mengenai nisbah tersebut mencakup dalam konteks makro maupun mikro. Sehingga dalam penjelasannya tidaknya menjelaskan seberapa cepat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi regional

namun juga menjelaskan masalah disparitas maupun alokasi investasi antar region. Dalam perencanaan pembangunan regional tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menciptakan struktur spasial (ruang) yang menjamin terjadinya keseimbangan pembangunan regional, efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Ardani, 1992). Pertanyaannya apakah keseimbangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selalu sejalan ?

Williamson, menyatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan nasional suatu bangsa akan dilewati tahap-tahap disparitas antar wilayah. Pada tahap awal, disparitas antar wilayah (region) akan muncul dan akan melebar. Namun sejalan dengan semakin matangnya proses pembangunan, kesenjangan itu akan melewati suatu titik balik untuk kemudian semakin menyempit dan akhirnya menghilang (Williamson, 1965). Hipotesa ini pada dasarnya memperkuat hipotesa Kuznet yang populer dengan hipotesa "U terbalik", yang menyatakan bahwa pada awal proses pembangunan terdapat *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Wacana ini telah menjadi topik kajian oleh berbagai ahli kurang lebih selama dua dasa warsa sejak dinyatakannya. Baru pada akhir tahun 70-an muncul kritik dari Anand dan Kanbur yang melihat adanya kelemahan pada data dan teknik analisis yang digunakan oleh Kuznet dan menolak hipotesis tersebut (Gatak 1995). Selanjutnya Deininger dan Squire (1997) berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa pertama, *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan tidak ditemukan; kedua, disparitas akan menjadi kendala bagi pencapaian pertumbuhan yang berkesinambungan.

Menurut Michel (1983) studi mengenai alokasi investasi diantara region dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan redistribusi antar region masih jarang kecuali yang dilakukan oleh Koichi Mera. Azis (1994) menambahkan bahwa teori atau model alokasi investasi regional meskipun sudah menjadi aliran tersendiri, namun studi empiris dibidang ini masih langka. Sedang model-model teoritisnya baru berkembang sejak awal 1960-an. Apabila dirunut maka ekonom pertama yang memberi perhatian pada masalah diatas adalah Anisur Rahman, seorang ekonom Harvard yang mengembangkan modelnya melalui pendekatan *dynamic programming*.

Model Rahman dikembangkan oleh Intriligator dengan memperkenalkan konsep waktu yang *continous* dan fungsi alternatif objektif. Model Rahman lalu disempumakan oleh Takayama dan pada saat yang sama Sakashita juga Otshuki membuat generalisasi untuk model yang mencakup lebih dari dua region. Selanjutnya Fujita mengembangkan untuk berbagai kondisi returns to scale (Aziz 1940). Sedang studi empiris untuk studi alokasi investasi publik ditulis oleh Koichi Mera (1975).

Teori mengenai alokasi investasi yang ditulis oleh Rahman (1963) dan dikembangkan oleh Takayama (1967), sehingga modelnya dikenal dengan model Rahman-Takayama (R-T). Model R-T merupakan model perekonomian tertutup, dimana perekonomian dianggap terdiri dari dua region dan masing-masing memproduksi barang yang sama. Output masing-masing region merupakan proporsi dari investasi yang ditanainkan (*the regional capital stock*). Rasio tabungan bervariasi antar region. Total tabungan dikumpulkan

oleh pemerintah pusat untuk selanjutnya didistribusikan kembali ke region. Tujuan pemerintah pusat adalah menciptakan kesinambungan alokasi regional dana investasi yang mampu menghasilkan tingkat *output* nasional yang maksimal.

Berdasarkan kondisi-kondisi diatas maka formulasi asumsi-asumsi model R-T adalah (1) perekonomian terdiri dari 2 (dua) sektor; (2) masing-masing region memproduksi barang yang sama melalui fungsi produksi linier: $Y_i = b_i k_i$, dimana memiliki *output capital ratio* yang tetap dan tidak ada depresiasi *capital*; (3) total investasi dana berasal dari total tabungan masing-masing region; (4) *The propensity to save (s)* dan *out-put capital ratio (b)* konstan sepanjang waktu ; (5) total investasi dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan dialokasikan kembali ke masing-masing region. Oleh karena itu kenaikan investasi dalam suatu region dikarenakan adanya *stock capital*.

Masalah yang akan dipecahkan disini adalah berkaitan dengan cara mengalokasikan dana investasi pada masing-masing region untuk memaksimalkan total produksi (pendapatan ekonomi) pada masa mendatang. Sehingga pertumbuhan ekonomi regional dikontrol melalui investasi antar region, modelnya sebagai berikut:

$$\text{Objective: Max. } Y_i(t) = b_1 K_1(t) + b_2 K_2(t) \dots \dots \dots (10)$$

$$\text{Subject to : } K_i(t) = B(t) (a_1 K_1(t) + a_2 K_2(t))$$

Dimana:

$Y_i(t)$ = Pendapatan region i pada waktu t

$K_i(t)$ = Capital/ Investasi pada region i pada waktu t

b_i = *Output capital ratio* di region i

B = Proporsi total investasi di region i

Dan $a_1 = b_1 s_1$ adalah tingkat pertumbuhan autonomus di region i dan dari asumsi (3) di atas kita dapatkan $K_1 + K_2 = s_1 Y_1(t) + s_2 Y_2(t)$, dimana s adalah rasio tabungan.

Model R-T memperlihatkan bahwa kebijakan alokasi investasi yang optimal tergantung pada nilai relatif tingkat tabungan dan *the output-capital ratio*. Ada dua kasus yang berbeda : pertama, pada kasus umum yaitu apabila tidak ada perbedaan tingkat tabungan antar region, maka konsentrasi alokasi pada region yang paling produktif. Kedua, pada kasus dimana tingkat tabungan di region yang kurang produktif maka alokasi investasi diprioritaskan di daerah pertama.

Banyak kritik yang ditunjukkan pada model R-T (Ardani 1992). Pertama, tujuan akhir memaksimalkan tingkat produksi nasional identik dengan tujuan akhir kesejahteraan. Kedua, nilai b yang tetap (*output capital ratio*) bisa menurun seiring dengan kenaikan jumlah kapital/investasi, karena berlakunya hukum *diminishing return*. Ketiga, masing-masing region memproduksi barang yang sama, hal ini dianggap tidak realistis. Keempat, mengasumsikan perencanaan ekonomi terpusat, hal ini mungkin tidak cocok bagi negara dengan sistem campuran.

Model Fujita (1973) untuk satu jenis barang investasi (a single good system) menjelaskan bahwa apabila jenis investasi itu I dan dapat bergerak antar region tanpa input transport. Hanya terdapat dua region, yaitu r dan s . Sekali satu unit barang diinvestasikan maka barang tersebut menjadi *immobil*

capital di region yang bersangkutan. Sehingga alokasi yang optimal menurut model ini didasarkan atas upaya untuk memaksimalkan persamaan berikut :

$$\text{Maximize: } [\theta p^r (t+1) + (1-\theta)p^s (t+1)] I(t), \quad \theta \geq 0, \dots \quad (11)$$

Dimana θ adalah rasio jumlah barang yang diinvestasikan di region r dan p^l adalah (efisiensi) harga barang (capital) di region l.

Menurut model Fujita alokasi investasi regional tidak dipengaruhi oleh seberapa kecil perbedaan harga *capital* di masing-masing region. Melainkan hal itu dipengaruhi oleh harga tertinggi pada masing-masing periode. Dan investasi akan dialokasikan sama besar di kedua region ketika harga *capital* memiliki nilai yang sama di kedua region. Dalam model ini alokasi investasi memiliki karakter "*all or none*" yang kuat.

Jadi berdasarkan dua model diatas sementara dapat disimpulkan sebagai berikut. Menurut model R-T faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi investasi regional adalah tingkat tabungan relatif dan rasio *output-capital*. Sementara model Fujita menyimpulkan harga *capital* tertinggillah yang menentukan.

2.4. Penelitian Terdahulu.

Penelusuran penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian Disparitas Pertumbuhan Ekonomi yang sudah dan/ atau belum diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian terdahulu ini akan dapat dipastikan sisi ruangan yang dapat diteliti

oleh penelitian ini. Sehingga penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak melakukan penelitian ulangan dengan peneliti-peneliti terdahulu.

Keputusan untuk memilih penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan diusahakan dipilih dari judul-judul mengenai pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan masalah disparitas maupun alokasi investasi antar region. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk ditampilkan disini adalah sebagai berikut :

Iwan Jaya Asiz (1985) dalam penelitiannya berjudul "*Pembangunan Daerah dan Aspek Alokasi Investasi Antar Daerah*".

Dengan menggunakan Analisa Location Quotient (LQ) ditemukan bahwa di Indonesia bagian utara dan timur, kecuali Kalimantan Barat, nilai LQ sektor manufaktur tidak ada yang melebihi satu. Gambaran ini jelas mencerminkan tingkat industrialisasi yang masih rendah di wilayah tersebut. Nilai LQ di Irian Jaya bahkan hanya mencapai 0,061 dan 0,084 masing-masing untuk tahun 1975 dan 1980.

Sjafrizal (1997) dalam penelitiannya berjudul "*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*".

Dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) untuk periode 1971 - 1993 diperoleh kesimpulan bahwa pemerataan pembangunan antar daerah di Wilayah Indonesia bagian Barat secara relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata seluruh Indonesia, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi masing-masing propinsi umumnya cukup tinggi yaitu

berkisar antara 7 - 8,5 persen setiap tahun, sementara itu ketimpangan regional juga relatif rendah dan cenderung menurun beberapa tahun terakhir.

Sunoto (1995) dalam penelitiannya berjudul "*Analisa Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Propinsi Bengkulu*"

Dengan menggunakan Indeks Williamson disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diikuti oleh tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah, ini dapat dilihat dari nilai Indeks Williamson dari 0,25 pada tahun 1983 menjadi 0,46 pada tahun 1990 dan turun menjadi 0,33 pada tahun 1993.

Bayu Wijayanto (1996) dalam penelitiannya berjudul "*Disparitas Alokasi Investasi Regional di Indonesia*"

Dengan menggunakan Koefisien Theil untuk menghitung nilai variasi alokasi investas antar propinsi, antar wilayah dan antar propinsi dalam satu wilayah. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa angka koefisien variasi alokasi investasi

tertinggi terdapat pada kategori variasi antar propinsi, yaitu sebesar 10,48, dengan rata-rata alokasi investasi antar propinsi sebesar Rp.6,1 trilyun dan investasi tertinggi terjadi di propinsi Jawa Barat dengan alokasi Rp.49 trilyun dan alokasi terendah di propinsi Timor-Timur sebesar Rp. 71,5 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi disparitas alokasi investasi yang terburuk terjadi pada alokasi investasi antar propinsi.

Model R-T yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen melalui variabel yang terpilih. Hal ini diperlihatkan melalul F statistik yang signifikan pada α kurang dari 0,0005 dan

nilai adjusted R^2 92 persen. Nilai t test dari masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu mempengaruhi secara signifikan perilaku variabel dependen. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat tabungan dan rasio output capital merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi investasi regional di Indonesia dapat diterima.

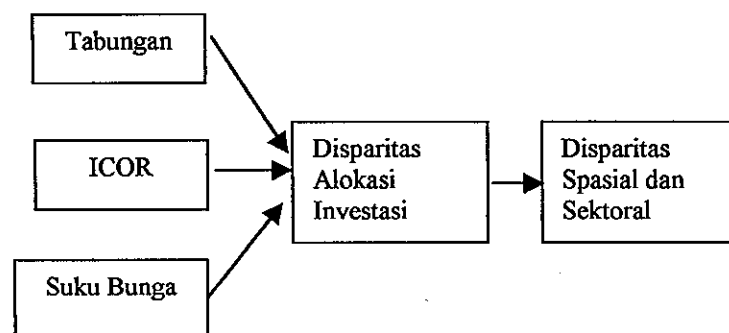
2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis.

Pembentukan modal melalui tabungan merupakan pendorong terbentuknya sumber investasi (Basuki Soelistyo 1997;64). Model Rahman Takayama (R-T) memperlihatkan bahwa kebijakan alokasi investasi yang optimal tergantung pada nilai relatif tingkat tabungan dan the output capital (Bayu Wijayanto 2000; 4).

Dari pendekatan perubahan struktur ekonomi dikembangkan alat ukur keberimbangan antar sektor oleh Yotopoulos dan Hugi (1970). Dari hasil penelitian empiris tersebut disusun suatu teori pembangunan oleh Miernyk (1971) dimana dibandingkan antara perencanaan dan kebijakan yang menjurus ke pertumbuhan berimbang dan perencanaan serta kebijakan yang menjurus ke pertumbuhan tidak berimbang. Oleh karena itu berbagai sektor perekonomian saling tergantung satu sama lain, maka tidaklah cukup untuk memusatkan diri pada pengembangan sektor tertentu saja. Berbagai sektor perekonomian harus tumbuh dengan cara yang serasi sehingga tidak ada sektor yang tertinggal dibelakang atau tumbuh terlalu cepat dari yang lain (Jhingan 1999,52).

Pada Persamaan (3) menunjukkan bahwa nilai atau jumlah investasi (misalnya dalam jumlah proyek) sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga di dalam negeri, selain juga sejumlah faktor-faktor lain yang bersifat otonom (I_a). Semakin tinggi suku bunga, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap (tidak berubah), semakin mahal biaya investasi, semakin kecil jumlah investasi di dalam perekonomian. (Tulus Tambunan, 2001:42)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini disajikan secara skematis sebagai berikut :



Keterangan :
 —————> Mempengaruhi

Gambar 2.2
 Kerangka Konseptual Penelitian

2.6. Hipotesis.

Berdasarkan teori-teori serta kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dirumuskan sebagai :

“Disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua dipengaruhi oleh tingkat tabungan , incremental capital output ratio (ICOR) dan suku bunga “

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan studi kasus di Propinsi Papua meliputi 9(sembilan) kabupaten yaitu Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Biak Numfor dan Yapen Waropen.

Kabupaten yang telah dipilih merupakan kabupaten yang sudah lama ada sejak integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan lain dipilihnya kabupaten tersebut karena ketersediaan data .

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*time series*) dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2000.

Ada beberapa kabupaten/Kota yang tidak masuk dalam penelitian ini seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, kota Jayapura dan Kota Sorong karena merupakan kabupaten/kota yang baru dimekarkan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua, data yang diperlukan adalah :

1. Data PDRB Kabupaten dan Propinsi diperoleh dari laporan Pendapatan Regional Propinsi Irian Jaya kerjasama BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan Kantor BPS Propinsi Irian Jaya.

2. Data Realisasi Investasi Swasta (PMDN dan PMA) diperoleh dari Laporan Tahunan BKPM Daerah Propinsi Irian Jaya.
3. Data suku bunga dan tabungan masyarakat di lembaga perbankan di Propinsi Irian Jaya diperoleh dari Laporan Tahunan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Propinsi Irian Jaya oleh Bank Indonesia Cabang Jayapura.

Selanjutnya untuk menganalisis disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten maupun antar sektor, maka data yang diperlukan adalah :

1. Data PDRB Kabupaten dan Propinsi diperoleh dari laporan Pendapatan Regional Propinsi Irian Jaya kerjasama BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan Kantor BPS Propinsi Irian Jaya.
2. Data penduduk kabupaten di Propinsi Irian Jaya diperoleh dari Irian Jaya Dalam Angka oleh Kantor BPS Propinsi Irian Jaya.

3.3. Metode Analisis.

3.3.1. Alat Analisis.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua digunakan metode analisis regresi. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Rahman – Takayama (Bayu Wijayanto, 2000:6).

Spesifikasi model dimana alokasi investasi regional dianggap merupakan fungsi dari tingkat tabungan dan incremental capital output ratio (ICOR). Kemudian dalam model ditambahkan variabel suku bunga sebagai

faktor yang mempengaruhi alokasi investasi, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$inv'_i = f(tab'_i, icor'_i, sub'_i) \quad (12)$$

dimana :

inv'_i = Penanaman modal swasta baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Propinsi Papua pada periode 1986 - 2000.

tab'_i = Jumlah nilai simpanan masyarakat di lembaga perbankan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing di Propinsi Papua pada periode 1986 - 2000.

$icor'_i$ = incremental capital output ratio (ICOR) di Propinsi Papua pada periode 1986-2000

sub = Suku bunga kredit yang berlaku pada Bank Pemerintah di Propinsi Papua pada periode 1986 - 2000.

Untuk menjadikan model persamaan diatas menjadi linier, maka disederhanakan dalam bentuk Ln (linier natural) sebagai berikut :

$$\text{LnY} = \alpha + \beta_1 \text{LnX}_1 + \beta_2 \text{LnX}_2 + \beta_3 \text{LnX}_3 + \mu \quad (13)$$

dimana :

LnY = Investasi

LnX_1 = Tabungan

LnX_2 = Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

LnX_3 = Suku Bunga

α = konstanta

β = koefisien regresi

Untuk menganalisis adanya disparitas alokasi investasi antar kabupaten dan disparitas dalam pertumbuhan ekonomi di Propinsi Papua, digunakan rumus koefisien korelasi Pearson (*Pearson's product moment coefficient of correlation*) Supranto,1997:146;

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}} \quad (14)$$

Kemudian dengan menampilkan data persentase realisasi investasi akan digunakan juga nilai Deviasi Standar dengan rumus (Robert.D.Mason,et all.1996;129)

$$\sigma = \frac{\Sigma(x - \mu)^2}{N} \quad (15)$$

di mana :

σ adalah deviasi standar

X adalah nilai setiap pengamatan dalam sampel

μ adalah rata-rata hitung sampel

N adalah jumlah total pengamatan

Selanjutnya untuk dapat melihat sejauhmana hubungan(korelasi) antara Deviasi Standar alokasi investasi dan pertumbuhan ekonomi digunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut (Sjafrizal, 1990):

$$VW = \sqrt{\frac{\sum (y_i - y)^2 f_i/n}{y}} \quad (16)$$

Dimana:

Vw : Angka indeks Williamson

y_i : Pendapatan per kapita kabupaten ke i

- y : Pendapatan perkapita rata-rata seluruh kabupaten
 f : Penduduk di kabupaten ke i
 n : Penduduk propinsi.

Kemudian untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten dalam hal ini dianalisis dengan menggunakan *Typologi Klassen* sebagai berikut (Richardson, 1978):

Tabel 3.1 : Pembagian Perkembangan Daerah Menurut masing-masing Tipologi.

r	y	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$		Daerah Maju dan Tumbuh Cepat	Daerah Berkembang Cepat
$r_i < r$		Daerah Maju Tapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal

Dimana :

- r_i adalah laju pertumbuhan PDRB di kabupaten
 r adalah pertumbuhan PDRB rata-rata keseluruhan kabupaten
 y_i adalah pendapatan per kapita kabupaten
 y adalah pendapatan rata-rata perkapita keseluruhan kabupaten

Lebih lanjut untuk menganalisis disparitas pertumbuhan antar sektor ekonomi digunakan deviasi standar dengan terlebih dahulu melihat pertumbuhan antar sektor ekonomi dengan menggunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*.

Perhitungan nilai LQ menggunakan rumus sebagai berikut (Paul Sihotang, 1991):

$$LQ = \frac{X_i^r / X^r}{X_i^n / X^n} \quad (17)$$

Yang menunjukkan bahwa:

- LQ : nilai location quotient
- x : variabel yang diamati
- r : kabupaten
- i : sektor
- n : propinsi

Perhitungan dalam LQ adalah dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah (kabupaten) dengan sumbangan sektor tersebut secara keseluruhan terhadap pembentukan PDRB dari seluruh wilayah yang lebih luas (Propinsi). Apabila nilai LQ lebih besar daripada 1, maka wilayah yang bersangkutan berpotensi untuk mengembangkan sektor yang diamati dan sekaligus melihat disparitas/ketimpangan satu sektor dengan sektor lainnya.

3.3.2. Prosedur Analisis.

Khusus analisa regresi dalam penelitian ini sebelum melakukan estimasi, model tersebut terlebih akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini adalah untuk melihat kemungkinan-kemungkinan pelanggaran asumsi-asumsi klasik. Pelanggaran asumsi klasik tersebut meliputi ada tidaknya autokorelasi, heterokedastisitas dan multokolinearitas. Lebih jauh uji pelanggaran asumsi klasik tersebut sebagai berikut :

1. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS 11 dimana dalam setiap prosedur regresi selalu dicantumkan pilihan uji tersebut.

Untuk melakukan uji autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan besaran Durbin Watson, dimana ketentuannya adalah (Gujarati, 1995) :

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$dU < d < 4 - dU$

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi berganda antar variabel independen. Variabel kolinear mengakibatkan pengaruh pada variabel dependen menjadi sangat mirip dan sangat sulit dipisahkan pengaruh dari individual masing-masing.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melakukan regresi tambahan (*auxiliary regression*), yaitu dengan melakukan regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lain kemudian dicari nilai R^2 nya dibandingkan dengan nilai R^2 dari regresi utama. Apabila nilai R^2 dari regresi tambahan lebih besar dari nilai regresi utama maka dapat dipastikan bahwa terdapat gejala multikolinearitas (Gujarati, 1995).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas memakai metode chart dimana hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara *Regression Studentized Residual* dan *Regeression Standardized Predicted Value* terlihat titik-titik (point-point) menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi investasi berdasarkan masukan variabel independennya.

Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser dengan menggunakan SPSS 11, dimana nantinya output dari uji tersebut berupa signifikansi dari variabel-variabel terhitung. Bila output uji signifikan, berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sebaliknya bila output uji tidak signifikan berarti homoskedastisitas tidak terjadi.

Analisis Koefisien Determinasi R^2 (R Square)

Nilai R^2 untuk menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model. Pada intinya koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilainya antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat

terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2001:47).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Alat uji statistik regresi berganda digunakan untuk mencari pengaruh sekumpulan variabel independent terhadap suatu variabel dependen. Model persamaan analisis adalah :

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu \quad (18)$$

keterangan :

Y = Investasi

X₁ = Tabungan

X₂ = Incremental Capital Output Kapital (ICOR)

X₃ = Suku Bunga

Untuk memperlihatkan sejauhmana adanya disparitas alokasi investasi antar kabupaten di Propinsi Papua dengan menampilkan data persentase realisasi investasi swasta kemudian dihitung nilai deviasi standar. Apabila nilai deviasi standar semakin besar berarti menunjukkan terjadinya disparitas/ketimpangan alokasi investasi.

Kemudian untuk melihat sejauhmana hubungan (korelasi) antara disparitas alokasi investasi dan disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten, digunakan nilai deviasi standar alokasi investasi dan nilai Indeks

Williamson periode 1986 sampai dengan 2000, dengan kriteria sebagai berikut (Supranto,1997:146) :

Kalau $r = 1$, hubungan X dan Y sempurna dan positif (mendekati 1, hubungan sangat kuat dan positif).

= -1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif (mendekati -1, hubungan sangat kuat dan negatif).

= 0, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan.

Dimana : X adalah Deviasi Standar alokasi investasi.

Y adalah Indeks Williamson.

Lebih lanjut tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah/kabupaten , dianalisis dengan menggunakan Tipologi Klassen. Melalui analisis ini akan diperoleh 4 klasifikasi daerah yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu Daerah Bertumbuh Cepat (*Rapid Growth Region*), Daerah Tertekan (*Retarded Region*), Daerah Sedang Bertumbuh (*Growing Region*) dan Daerah Relatif Tertinggal (*Relatively Backward Region*). (Sjafrizal 1997;30).

Adapun kriteria dalam mengklasifikasi 4 daerah adalah sebagai berikut :

Kuadran 1 $\rightarrow r_i > r ; y_i > y =$ Daerah Maju dan Tumbuh Cepat

Kuadran 2 $\rightarrow r_i > r ; y_i < y =$ Daerah Berkembang Cepat

Kuadran 3 $\rightarrow r_i < r ; y_i > y =$ Daerah Maju Tapi Tertekan

Kuadran 4 $\rightarrow r_i < r ; y_i < y =$ Daerah Relatif Tertinggal

Dimana :

- r_i adalah laju pertumbuhan PDRB di kabupaten.
- r adalah pertumbuhan PDRB rata-rata keseluruhan kabupaten.
- y_i adalah pendapatan per kapita kabupaten.
- y adalah pendapatan rata-rata perkapita keseluruhan kabupaten.

Kemudian untuk menganalisis disparitas pertumbuhan antar sektor ekonomi digunakan deviasi standar dengan melihat angka deviasi standar *besar* atau *kecil*. Kalau semakin besar berarti disparitas semakin tinggi. Sebelum melihat sejauhmana disparitas/kesenjangan antar sektor maka akan dianalisis perkembangan proses industrialisasi antar kabupaten adalah dengan mengamati perkembangan Location Quotient (LQ) yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan “kekuatan” atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah/kabupaten dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah/kabupaten lain. Dalam literatur pembangunan daerah disebutkan bahwa sektor disebuah daerah/kabupaten yang mempunyai nilai LQ di atas satu merupakan sektor “kuat”, sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengeksport produk dari sektor tersebut ke daerah/kabupaten lain. Sebaliknya, suatu daerah merupakan pengimpor produk sektor tertentu kalau nilai LQ-nya dibawah satu. (Iwan Jaya Aziz 1985;6).

3.4. Definisi Operasional.

- *Investasi.*

Yang dimaksud dengan investasi dalam penelitian ini adalah penanaman modal swasta baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah disetujui dan beroperasi di Propinsi Papua pada periode 1986 – 2000.

- *Tabungan.*

Yang dimaksud dengan tabungan dalam penelitian ini adalah nilai simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito di lembaga perbankan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing di Propinsi Papua pada periode 1986 – 2000.

- *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Incremental Capital Output Rasio dalam penelitian ini adalah selisih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan Investasi di Propinsi Papua pada periode 1986 – 2000.

$$\text{Atau } ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y}$$

- *Disparitas (Ketimpangan).*

Yang dimaksud dengan disparitas (ketimpangan) dalam penelitian ini adalah besarnya angka Indeks Williamson dan Deviasi Standar yang dihasilkan dari perhitungan rumus/model, semakin tinggi angka indeks Williamson dan Deviasi Standar maka semakin timpang alokasi investasi yang juga menyebabkan juga ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi.

- Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk yang digunakan dalam analisa ini adalah jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di tiap kabupaten dalam Propinsi Papua tahun 1986 – 2000. Jumlah penduduk dalam analisa ini adalah jumlah penduduk keseluruhan yang diperoleh dari hasil survei antar sensus tahun 2000.

- Pendapatan Perkapita.

Pendapatan perkapita dalam penelitian ini adalah jumlah yang diperoleh dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun.

- Suku Bunga.

Suku bunga dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata harga tertinggi dan harga terendah dari suku bunga kredit atau pinjaman pada bank pemerintah di Propinsi Papua pada periode 1986 – 2000.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PROPINSI PAPUA

4.1. Letak dan luas wilayah

Propinsi Papua terletak pada posisi $0^{\circ} 19'$ - $10^{\circ} 45'$ Lintang Selatan dan $130^{\circ} 45'$ - $141^{\circ} 48'$ Bujur Timur, menempati setengah bagian barat dari New Guinea yang merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland.

Dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara = Laut Halmahera dan Samudera Pasific
- Sebelah Selatan = Laut Arafura dan Benua Australia
- Sebelah Timur = Negara Papua New Guinea dan
- Sebelah Barat = Laut Seram, Laut Banda dan Propinsi Maluku

Secara phisik, Papua merupakan propinsi terluas di Indonesia, dengan luas daratan 21,9 persen dari total tanah seluruh Indonesia yaitu 421.981 Km², membujur dari barat ke timur (Sorong – Jayapura) sepanjang 1.200 km (744 mile) dan dari utara ke selatan (Jayapura – Merauke sepanjang 736 km(456 mile). Selain tanahnya yang luas, Papua juga memiliki banyak pulau yang berjejer disepanjang pesisirnya. Di pesisir utara terdapat pulau Biak, Numfor, Yapen dan Mapia. Di sebelah barat terdapat pulau Salawati, Batanta, Gag, Waigeo dan Yefman. Dipesisir selatan terdapat pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak dan Panjang, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea.

Propinsi Papua terletak tepat disebelah selatan garis khatulistiwa, namun karena daerahnya yang bergunung-gunung maka iklimnya sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Di Daerah pesisir barat dan utara beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1.500-7.500 mm pertahun. Curah hujan tertinggi terjadi dipesisir pantai utara dan di pegunungan tengah, sedangkan curah hujan terendah terjadi di pesisir pantai selatan. Suhu udara bervariasi sejalan dengan bertambahnya ketinggian. Untuk setiap kenaikan ketinggian 100 m (900 feet), secara rata-rata suhu akan menurun $0,6^{\circ}\text{C}$.

Keadaan topografi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi yang dipadati dengan hutan hujan tropis, padang rumput dan lembah dengan alang-alangnya. Dibagian tengah berjejer rangkaian pegunungan tinggi sepanjang 650 km. Salah satu bagian dari pegunungan tersebut adalah pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena disana terdapat 3 puncak tertinggi yang walaupun terletak di dekat khatulistiwa namun selalu diselimuti oleh salju abadi yaitu Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5.030m (15.090 ft), Puncak Trikora 5.160 m (15.480 ft) dan Puncak Yamin 5.100 m (15.300 ft).

Sungai-sungai besar beserta anak sungainya mengalir ke arah selatan dan utara. Sungai Digul yang bermula dari pedalaman Merauke mengalir ke Laut Arafura. Sungai Wainai, Wagona dan Mamberamo yang melewati Kabupaten Jayawijaya, Paniai dan Jayapura bermuara ke Samudera Pasifik. Sungai-sungai tersebut mempunyai peranan penting bagi masyarakat sepanjang

alirannya baik sebagai sumber air bagi kehidupan sehari-hari, sebagai penyedia ikan maupun sebagai sarana penghubung ke daerah luar. Selain itu terdapat pula beberapa danau, diantaranya yang terkenal adalah Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, Danau Yamur, Danau Tigi dan Danau Paniai di Kabupaten Nabire dan Paniai.

Luas wilayah kabupaten-kabupaten di Propinsi Papua dapat digambarkan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten di Propinsi Papua

No	Kabupaten	Luas Wilayah Kabupaten Km ²	Prosentase Luas Masing-masing Daerah
1	Jayapura	62.433	12,70
2	Biak	3.130	0,80
3	Yapen Waropen	18.746	4,50
4	Paniai	45.552	11,00
5	Manokwari	34.213	8,20
6	Sorong	37.901	9,10
7	Fak-Fak	40.160	9,70
8	Jayawijaya	52.916	15,00
9	Merauke	119.479	28,90
	Jumlah	414.800	100,00

Sumber : Irian Jaya dalam Angka Tahun 1996.

4.2. Kependudukan.

Jumlah Penduduk di Propinsi Papua berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh kantor Statistik Propinsi Papua sampai dengan tahun 2000 adalah sebanyak 2.233.530 orang atau 1,0 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Jayawijaya sejumlah 417.326 orang, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 79.356 orang.

Secara rata-rata laju pertumbuhan penduduk Papua selama periode 1971-1980 tumbuh dengan 2,67 persen ,periode 1980 –1990 tumbuh 3,46 persen sedangkan pada kurun waktu 1990 – 1995 dan 1995 – 1999 masing-masing tumbuh dengan 3,34 persen dan 2,19 persen . Pada akhir tahun 1999 penduduk Papua mencapai 2,165 juta jiwa lebih, hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil SUPAS 1995 (Irian Jaya Dalam Angka 1999;69).

Adapun penyebaran penduduk di Propinsi Papua tahun 2000 menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh Kantor Statistik Propinsi Papua sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2.Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Propinsi Papua 1999.

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Km ²
1	Merauke	111,749	307.400	2,57
2	Jayawijaya	52,916	479.800	9,07
3	Jayapura	61,493	149.300	2,43
4	Paniai	15,563	108.000	6,94
5	Puncak Jaya	14,532	64.100	4,41
6	Nabire	10,427	111.800	10,91
7	Fak-Fak	20,546	63.556	3,09
8	Mimika	27,534	57.044	2,07
9	Sorong	38,684	263.500	6,81
10	Manokwari	37,901	174.700	4,61
11	Yapen Waropen	18,746	73.700	3,91
12	Biak Numfor	3,130	104.600	33,42
13	Kota Jayapura	940	208.200	221,49
	J u m l a h	421,981	2.165.300	5,13

Sumber : Irian Jaya dalam angka 1999;91.

Menurut proyeksi beberapa pihak, penduduk Propinsi Papua pada tahun 2.010 diperkirakan akan berjumlah antara 2,6 – 3,9 juta tergantung pada banyaknya transmigrasi yang akan dilaksanakan.

4.3. Perekonomian.

Sebelum tahun 1998 atau sebelum badai krisis menunjukkan dampaknya di Papua, pembangunan ekonomi Papua tampak terus meningkat dari tahun ke tahun, hal itu ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama kurun waktu sebelumnya relatif cukup tinggi. Salah satu informasi/data ekonomi yang digunakan sebagai indikator untuk menilai atau mengevaluasi pembangunan ekonomi adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selama kurun waktu 1993 – 1997 perekonomian Papua mengalami pertumbuhan rata-rata 12,25 persen perhitungan termasuk sub sektor pertambangan rata-rata 9,67 persen tanpa sub sektor pertambangan. Bertambahnya investasi diberbagai sektor ekonomi dan meningkatnya produksi sektor pertambangan yang merupakan sektor penyumbang nilai tambah terbesar bagi perekonomian Papua akan memacu terus pertumbuhan ekonomi di Papua. Meskipun pertumbuhan ekonomi Papua relatif tinggi pada kurun waktu tersebut namun dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi, pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah sebesar 7,23 persen dan tahun 1995 mencapai pertumbuhan yang tertinggi yaitu 20,18 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 1995 tersebut dipacu oleh pertumbuhan sub sektor pertambangan yang tumbuh 32,94 persen yang merupakan realisasi kebijakan perusahaan Freeport dengan melipatgandakan produksi pada tahun tersebut. (Dinas Tenaga Kerja Propinsi Irian Jaya 2000;34-35).

Badai krisis melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Memasuki tahun kedua masa krisis (1998) Indonesia mengalami cobaan yang cukup berat dalam berbagai dimensi kehidupan atau tahun 1998 merupakan tahun bersejarah bagi kehidupan bangsa Indonesia baik dari segi politik, sosial budaya maupun kehidupan perekonomian. Hal itu disebabkan karena pengaruh faktor eksternal dan internal. Pengaruh eksternal datangnya dari berbagai penjuru negara terutama pengaruh dari krisis negara-negara Asia, seperti guncangan ekonomi yang melanda Jepang, Cina, Korea Selatan atau Thailand. Faktor eksternal lainnya adalah masalah utang luar negeri yang jatuh tempo yang selama ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak tangguh dan semakin berkurangnya kepercayaan investor untuk investasi di Indonesia.

Dampaknya terhadap perekonomian Papua dari krisis yang multidimensional tersebut tampaknya tidak berpengaruh. Hal ini dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Papua selama periode pengamatan 1986 – 2000 terus meningkat.

Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Papua
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1986 – 2000

Tahun	P D R B
1986	820.882.900.000
1987	848.223.220.000
1988	923.709.140.000
1989	1.054.095.260.000
1990	1.137.853.700.000
1991	1.243.419.360.000
1992	1.844.150.890.000
1993	2.361.863.420.000
1994	2.689.618.750.000
1995	3.045.135.670.000
1996	4.422.723.260.000
1997	5.031.440.100.000
1998	6.198.513.630.000
1999	6.918.996.310.000
2000	8.071.736.670.000

Sumber : Pendapatan Regional Propinsi Irian Jaya 1986-2000.

Keterangan : - 1986 - 1992 ADH Konstan Tahun 1983

- 1993 - 2000 ADH Konstan Tahun 1993

4.4. Investasi.

Untuk meningkatkan investasi di Papua pemerintah pusat telah menempuh kebijakan yaitu memberikan kewenangan kepada BKPM Papua untuk dapat mengeluarkan ijin penanaman investasi yang bernilai hingga miliaran rupiah. Maksud dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha daerah dan ditargetkan bagi pengusaha daerah Papua sendiri. Selain itu bidang usaha yang dapat diberikan ijinnya melalui BKPM adalah usaha yang menyangkut bidang usaha yang memiliki target pasar lokal.

Sedangkan kebijakan pemerintah untuk mendorong investor menanamkan modalnya di Papua adalah dengan pemotongan jalur birokrasi, antara lain dengan dihapusnya ketentuan keharusan adanya rekomendasi dari gubernur, bupati dan dari instansi yang memungkinkan untuk ditiadakan rekomendasi tersebut.

Tabel 4.4. Realisasi Investasi Swasta di Propinsi Papua Tahun 1986-2000.

Tahun	Investasi (dalam rupiah)
1986	115.869.276.000
1987	285.412.263.000
1988	413.845.544.000
1989	398.582.620.000
1990	449.815.277.000
1991	629.566.643.000
1992	771.909.382.000
1993	1.252.353.115.000
1994	1.563.155.396.000
1995	2.654.611.285.000
1996	3.042.758.049.000
1997	3.982.054.884.000
1998	3.023.865.807.000
1999	3.080.122.241.000
2000	3.049.629.761.000

Sumber : Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Papua 1986-2000

Pada tahun 1989 mengalami penurunan Rp.398.582.620.000, namun terus meningkat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997, kemudian mengalami fluktuasi tahun 1998 – 2000 yang disebabkan karena terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sehingga memberi dampak terhadap kegiatan investasi di Papua.

4.5. Tabungan.

Dalam hal mobilisasi dana di Propinsi Papua, tabungan merupakan bagian terbesar dari seluruh dana pihak ketiga yang dihimpun. Bila dilihat pada Tabel 4.5, mobilisasi dana dalam bentuk tabungan di Propinsi Papua ini tampak menonjol di dua kabupaten, yaitu Jayapura dan Sorong. Karena dari seluruh tabungan yang dihimpun perbankan di Papua, lebih dari setengahnya berada di kedua kabupaten tersebut.

Namun secara keseluruhan dapat dilihat bahwa selama periode 1986-1997 jumlah tabungan terus meningkat secara bertahap dan pada tahun 1998 naik cukup fantastis sebesar Rp.1.106.270.000.000,-. Hal ini menunjukkan kesadaran menabung penduduk Papua dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran serta Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.

Tabel 4.5. Penghimpunan Dana dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kabupaten (juta rupiah)

Kab Thn	Jayapura	Sorong	Blak Numfor	Manokwari	Merauke	Yapen Waropen	Jayawijaya	Fak-Fak	Paniai	Jumlah
1986	10.947	4.197	2.117	1.817	1.126	906	549	895	283	22.837
1987	11.707	6.473	3.698	2.453	1.481	1.359	912	1.324	487	29.894
1988	15.791	8.370	3.874	3.669	2.983	1.407	1.287	1.930	893	39.304
1989	21.097	8.740	4.815	3.995	2.309	1.521	1.413	2.078	921	46.889
1990	32.318	14.905	5.461	4.149	5.722	2.378	2.017	3.121	1.673	71.744
1991	37.882	15.875	6.253	4.195	5.564	1.325	1.704	3.087	1.999	77.884
1992	42.229	18.130	6.501	4.454	5.280	1.039	491	2.113	1.300	81.537
1993	51.792	12.748	5.234	4.127	5.970	726	406	2.041	1.591	84.635
1994	55.663	15.205	5.640	5.770	5.044	586	401	3.326	1.147	92.785
1995	63.517	20.764	11.537	8.544	5.451	705	404	3.571	1.069	115.562
1996	76.437	30.711	7.184	12.680	8.227	890	461	7.797	1.383	145.770
1997	184.185	83.539	95.242	38.690	21.540	5.061	3.974	38.646	14.395	485.272
1998	427.040	179.587	133.417	64.852	63.975	15.138	9.968	173.302	38.991	1.106.270
1999	333.469	136.696	60.489	51.441	44.600	12.102	9.335	67.475	23.826	739.433
2000	343.630	146.748	58.773	54.123	49.219	17.055	1761	74.095	23.167	768.571

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Propinsi Irian Jaya, 1986 - 2000

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Disparitas Alokasi Investasi Daerah di Propinsi Papua.

Pada bagian pembahasan ini akan dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua dengan menggunakan analisis regresi berganda . Dan untuk melihat sejauhmana disparitas alokasi investasi terjadi antar kabupaten akan dianalisis juga dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson dan deviasi standar. Untuk penggunaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini, digunakan pendekatan fungsi $inv_i^t = f(tab_i^t, icor_i^t, sub_i^t)$ dan menggunakan data time series dari tahun 1986 – 2000. Untuk memperkecil variasi data, analisis persamaan ditransformasikan dalam bentuk persamaan regresi :

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \mu \quad (19)$$

Dimana :

Y = Investasi

X₁ = Tabungan

X₂ = Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

X₃ = Suku Bunga

α = Konstanta

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi

μ = Faktor gangguan.

Untuk mengolah data penulis menggunakan software atau program SPSS11.

5.1.1. Uji Penyimpangan Klasik

Adapun pengujian terhadap asumsi klasik dengan bantuan program SPSS 11 yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :

1. Uji Multikolinieritas

Setelah dilakukan Uji Multikolinieritas pada variabel-variabel bebas dengan menggunakan *auxiliary regression*, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas pada model yang diajukan, bebas dari multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan indikator kecilnya nilai R^2 pada *auxiliary regression* dari pada nilai R^2 pada model persamaan yang diajukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 5.1

Tabel 5.1
Perbandingan Nilai R^2

JENIS REGRESI	NILAI R^2
Regresi Model	0,976
Auxiliary Regression 1	0,388
Auxiliary Regression 2	0,261
Auxiliary Regression 3	0,434

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2002

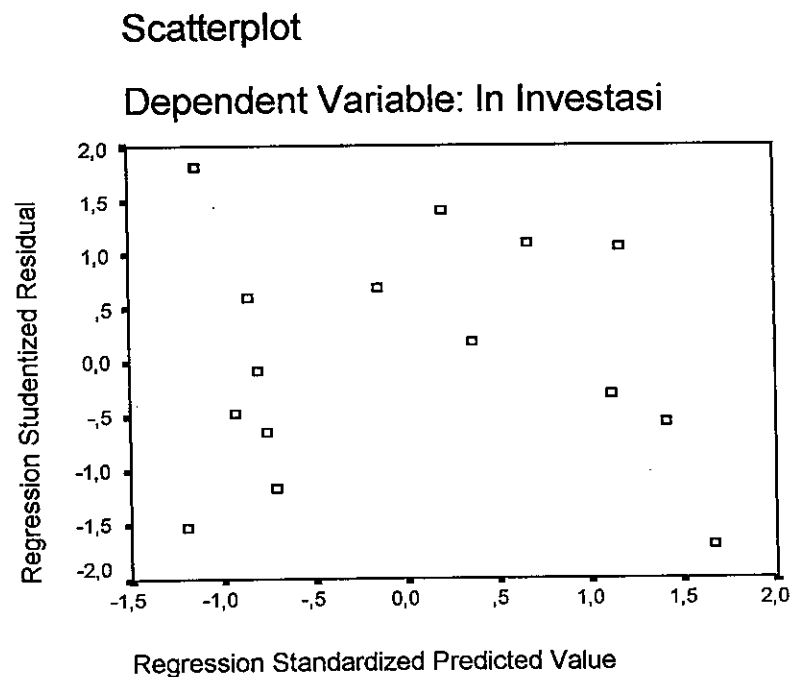
2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode chart dimana hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara *Regression Studentized Residual* dan *Regression Standardized Predicted Value* yang terlihat titik-titik (point-

point) menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y(Lampiran 8).

Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi investasi berdasarkan masukan variabel independennya. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 5.1 berikut :

Gambar 5.1
Uji Heteroskedastisitas



Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser dengan menggunakan SPSS 11, dimana nantinya output dari uji tersebut berupa signifikansi dari variabel-variabel terhitung (Tabungan, ICOR dan Suku Bunga). Bila output uji signifikan berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sebaliknya bila output uji tidak signifikan berarti homoskedastisitas dapat ditolak. Berikut adalah Tabel 5.2, berdasarkan Lampiran 9

Tabel 5.2
Signifikansi Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,697	6,818		1,129	,283
	In Tabungan	-7,06E-02	,132	-,194	-,533	,604
	In ICOR	-,138	,345	-,133	-,401	,696
	In Suku Bunga	-1,732	1,518	-,432	-1,141	,278

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2002

Terlihat pada Tabel 5.2 di atas bahwa variabel-variabel terhitung tidak signifikan (lebih besar dari $\alpha = 0,05$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson (DW)*. Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,933 (dapat dilihat pada Lampiran 7). Dengan jumlah data (n) sama dengan 15 dan jumlah variabel (k) sama dengan 3 diperoleh angka $d_L = 0,814$ dan $d_U = 1,750$. Dengan syarat apabila nilai DW berada diantara d_U dan $4-d_U$ ($d_U < d < 4-d_U$) maka tidak terdapat autokorelasi dalam data yang digunakan untuk penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut ini.

Gambar 5.2
Hasil Pengujian Durbin Watson

Autokorelasi Negatif	Tanpa Kesimpulan	Tidak Terdapat Autokorelasi	Tanpa Kesimpulan	Autokorelasi Positif
dL 0,814	dU 1,750	DW _{test} 1,933	4 - dU 2,250	4 - dL 3,186

Dengan melihat Gambar 5.2, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai DW = 1,933 terletak antara 4 - dU dan dU maka **tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.**

5.1.2. Hasil Persamaan Regresi.

Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS 11, maka didapatkan persamaan akhir sebagai berikut :

$$Y = 18,392 + 0,567 X_1 + 0,692 X_2 - 2,068 X_3 \quad (20)$$

Se	(2,620)	(0,051)	(0,132)	(0,583)
T _{hitung}	(7,019)	(11,135)	(5,222)	(-3,545)

dimana :

$$\begin{aligned} F_{hitung} &= 147,869 \\ DW_{test} &= 1,933 \\ R^2 &= 0,976 \end{aligned}$$

Besarnya koefisien determinasi atau R² sebesar 0,976 atau 97,6 persen ini dapat diartikan bahwa 97,6 persen variasi variabel tidak bebas dapat

diterangkan oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya (2,4 persen) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar model.

Dari persamaan diatas besaran koefisien tabungan sebesar 0,567 dan bertanda positif berarti memberi pengaruh positif, sehingga dalam hal ini **β_1 bertanda positif**. Dengan demikian variabel tabungan berpengaruh positif terhadap Investasi. Namun koefisien tabungan sebesar 0,567 bila dibandingkan dengan kebutuhan investasi di Papua sebesar 18,392 sangat kecil sekali. Hal ini menunjukkan tabungan masyarakat melalui Perbankan di Papua sangat kecil sekali untuk membiayai investasi. Menghadapi keadaan seperti ini pilihan yang masih terbuka untuk menutup kekurangan dana investasi swasta adalah dari tabungan dalam negeri dalam hal ini tabungan pemerintah serta kredit perbankan baik bank pemerintah maupun swasta.

Sama dengan perhitungan diatas, besaran yang tertera pada koefisien ICOR sebesar 0,692 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : **β_2 bertanda positif** berarti, variabel ICOR memberi pengaruh positif terhadap Investasi. Secara sederhana ICOR ini menunjukkan berapa besarnya modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output untuk menaikkan investasi sebesar 0,692 persen. Dengan koefisien ICOR sebesar 0,692 persen menunjukkan bahwa penambahan output sebesar 0,692 persen yang dihasilkan oleh investasi di Propinsi Papua pada periode 1986 – 2000.

Sedangkan besaran yang tertera pada koefisien Suku Bunga sebesar -2,068 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : **β_3 bertanda negatif** berarti, variabel Suku Bunga memberi pengaruh negatif terhadap Investasi. Dengan

koefisien suku bunga sebesar $-2,068$ yang berarti bahwa peningkatan suku bunga pinjaman sebesar 1 persen akan menyebabkan investasi turun sebesar 2,068 persen. Kita ketahui bahwa suku bunga rendah merupakan instrumen andalan pemerintah meningkatkan investasi.

5.1.3. Pengujian Hipotesis.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda (*multiply regression analysis*) dengan bantuan program SPSS 11, dengan memperhatikan nilai t_{hitung} dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui signifikansi variabel independen secara terpisah (parsial) terhadap variabel dependen pada tingkat alfa = 5 %. Dengan syarat apabila variabel independen signifikan terhadap variabel dependen maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan apabila tidak signifikan maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian koefisien regresi parsial atau uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Penentuan t-tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5 persen (0,05 : 2) dengan $df = n - k$ didapatkan nilai t-tabel : 2,179 sedangkan t-hitung dari hasil output komputer melalui program SPSS 11 disajikan dalam Tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3
Nilai t_{hitung}

Variabel	t_{hitung}	T_{tabel}
Tabungan	11,135	2,179
ICOR	5,222	2,179
Suku Bunga	-3,545	-2,179

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2002

Melihat nilai t hitung yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas memang berpengaruh nyata (*significant*) pada tingkat alfa 5 persen.

Variabel tabungan berpengaruh positif terhadap disparitas alokasi investasi. Hal ini berdasarkan pada Tabel 5.3 di atas yang diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel tabungan lebih besar daripada t_{tabel} ($11,135 > 2,179$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel alokasi Investasi. Pada variabel ICOR juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap disparitas alokasi investasi. Hal ini berdasarkan pada Tabel 5.3 di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel ICOR lebih besar daripada t_{tabel} ($5,222 > 2,179$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ICOR berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel alokasi investasi. Sedangkan pada variabel suku bunga memiliki pengaruh yang negatif terhadap disparitas alokasi investasi. Dengan melihat pada Tabel 5.3 di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel suku bunga lebih besar daripada t_{tabel} ($-3,545 > -2,179$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel alokasi investasi. Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada persamaan, nilai uji F adalah 147,869

dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian pada persamaan semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi investasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa *disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua dipengaruhi oleh tingkat tabungan, incremental capital output ratio (ICOR) dan suku bunga* dapat diterima.

5.1.4. Hubungan disparitas alokasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.4 : Korelasi Deviasi Standar alokasi investasi dan Indeks Williamson.

Tahun	Deviasi Standar	Indeks Williamson
1986	12,441	0,249
1987	14,624	0,240
1988	14,528	0,231
1989	13,460	0,215
1990	11,946	0,209
1991	10,134	0,203
1992	7,682	0,208
1993	8,126	0,206
1994	7,991	0,155
1995	11,293	0,152
1996	9,321	0,149
1997	6,656	0,153
1998	5,288	0,158
1999	6,145	0,138
2000	8,294	0,182

Sumber : Data diolah dari Tabel 5.5 dan Tabel 5.8

Berdasarkan Tabel 5.4. dibuat korelasi/hubungan antara Deviasi Standar alokasi investasi dan Indeks Williamson. Menurut J.Supranto,1989:143-146; hubungan dua variabel ada yang positif dan negatif.

Sebaliknya dikatakan negatif kalau kenaikan (penurunan) X pada umumnya diikuti oleh penurunan (kenaikkan Y). Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y, apabila hubungan X dan Y dapat dinyatakan dengan fungsi linier (paling tidak mendekati), diukur dengan suatu nilai yang disebut Koefisien Korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar 1 . Jadi kalau r = koefisien korelasi, nilai r dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$-1 \leq r \leq 1$$

artinya :

Kalau $r = 1$, hubungan X dan Y sempurna dan positif (mendekati 1 , hubungan sangat kuat dan positif).

= -1 , hubungan X dan Y sempurna dan negatif (mendekati -1 , hubungan sangat kuat dan negatif).

= 0 , hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan.

Correlations

		DS	IW
DS	Pearson Correlation	1	,736**
	Sig. (2-tailed)	,	,002
	N	15	15
IW	Pearson Correlation	,736**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,
	N	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Berdasarkan perhitungan matrix korelasi diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara Deviasi Standar alokasi investasi dan Indeks Williamson adalah sebesar $0,736$.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara disparitas alokasi investasi (X) dan Indeks Williamson (Y) adalah kuat dan positif. Artinya bahwa semakin timpang alokasi investasi maka akan menyebabkan juga disparitas dalam pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di Propinsi Papua.

Tabel 5.5
Persentase Realisasi Investasi Swasta
di Propinsi Papua Tahun 1986 - 2000

Tahun	Merauke	Jayawijaya	Jayapura	Paniai	Fak-Fak	Sorong	Manokwari	Yapen Waropen	Blak Numfor	Total	Devisasi Standar
1986	5,450	3,465	13,298	2,585	41,070	18,842	4,496	4,015	6,779	100	12,441
1987	5,855	2,567	13,249	2,352	46,956	18,983	3,965	2,494	3,578	100	14,624
1988	5,054	2,276	15,643	2,662	46,698	17,280	4,452	2,542	3,412	100	14,528
1989	4,830	2,868	14,911	3,190	44,101	17,143	5,348	3,462	4,147	100	13,460
1990	6,081	3,808	16,411	4,055	39,731	16,632	5,296	3,574	4,412	100	11,946
1991	5,753	4,710	16,296	4,106	33,007	20,561	6,281	4,291	4,994	100	10,134
1992	6,157	4,984	20,318	5,387	18,549	24,354	7,024	5,089	8,138	100	7,682
1993	6,280	5,257	16,312	4,256	26,714	19,850	6,531	4,593	7,332	100	8,126
1994	6,014	5,108	17,821	5,280	26,613	19,171	7,891	4,787	7,343	100	7,991
1995	4,873	3,477	14,959	3,930	37,510	18,891	6,402	4,014	5,945	100	11,293
1996	5,072	3,594	15,833	4,522	30,550	20,501	6,717	4,323	8,887	100	9,321
1997	9,428	3,879	14,440	6,698	22,469	20,467	9,329	4,508	8,784	100	6,656
1998	7,524	5,398	12,974	8,980	16,358	21,943	11,731	6,069	11,668	100	5,288
1999	6,282	4,049	11,284	9,566	21,197	20,367	12,746	5,433	9,079	100	6,145
2000	4,962	3,226	10,573	8,458	29,966	17,995	10,448	5,075	9,298	100	8,294

Sumber : Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Papua (data diolah)

5.1.5. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan lainnya.

a. Alokasi Investasi antar Kabupaten.

Data pada Tabel 5.5. memberikan gambaran dimana angka deviasi standar tertinggi terjadi pada tahun 1987 sebesar 14,624 kemudian menurun secara bertahap pada tahun 1988 sebesar 14,528 sampai dengan tahun 1994 sebesar 7,991. Pada periode 1986 sampai dengan 1991 dapat dikatakan bahwa angka deviasi standar cukup tinggi walaupun terus menurun secara bertahap, bahkan pada tahun 1995 naik sebesar 11,293 kemudian turun sampai sebesar 5,288 tahun 1998 dan naik lagi sebesar 6,145 dan 8,294 pada tahun 1999 dan 2000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada zaman orde baru lebih banyak mengarahkan investasi swasta ke kabupaten yang secara ekonomi kaya akan sumberdaya alamnya, juga letaknya strategis dan tersedia infrastrukturnya seperti terlihat pada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Sorong bahkan mulai pada tahun 1997 – 2000 disusul juga oleh kabupaten Manokwari dan Biak Numfor dimana kelima kabupaten ini persentase realisasi investasi cukup besar. Apabila dilihat secara keseluruhan tahun pengamatan dari 1986 s/d 2000 menunjukkan angka deviasi standar yang semakin mengecil, berarti hal ini menunjukkan disparitas/kesenjangan mulai membaik. Artinya bahwa sudah mulai ada perhatian dari pemerintah untuk mendistribusikan aktivitas investasi ke kabupaten lainnya yang sumberdaya alamnya potensial namun belum tergarap oleh investor.

b. Perbedaan Sumber Daya Alam antar Kabupaten.

Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibanding di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan. Dalam arti sumber daya alam harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan terus (Tulus Tambunan, 2001; 285).

Tabel 5.6 memberikan gambaran sumber daya alam yang dimiliki tiap kabupaten di Propinsi Papua. Sektor-sektor yang ditampilkan adalah perkebunan, perikanan, kehutanan, migas, pertambangan tanpa migas dan penggalian dimana sektor-sektor ini lebih diminati investor dan merupakan tulang punggung perekonomian di Papua. Dari 9 (sembilan) kabupaten yang ditampilkan nampak bahwa kabupaten-kabupaten seperti Fak-Fak, Sorong, Merauke, Manokwari, Paniai termasuk kaya akan sumber daya alam.

Menurut Tabel 5.6 sampai dengan tahun 2000 Kabupaten Fak-Fak merupakan penyumbang terbesar melalui Produk Domestik Regional Brutonya sebesar Rp.12.157.527.710.000 diikuti oleh Sorong Rp.1.307.709.090.000 Merauke sebesar Rp.357.953.170.000, Manokwari sebesar Rp.344.667.270.000, dan Paniai Rp.254.295.400.000. Kabupaten-kabupaten seperti Jayapura, Biak Numfor, Yapen Waropen dan Jayawijaya adalah kabupaten dimana sumber daya alamnya terbatas karena bila dilihat dari kontribusi PDRB jumlahnya kecil.

Tabel 5.6. Sumber Daya Alam (SDA) Menurut Kabupaten di Propinsi Papua Tahun 2000 (dalam jutaan rupiah)

No	Kab Sub Sektor	Merauke	Jayawijaya	Jayapura	Paniai	Fak-Fak	Sorong	Manokwari	Yapen Waropen	Blak Numfor
1	Perkebunan	9.252,90	1.128,38	36.346,84	10.402,82	15.840,23	10.082,99	66.196,78	6.626,76	2.391,56
2	Perikanan	157.156,77	1.743,65	18.737,28	27.836,56	33.999,43	206.033,18	91.888,86	16.947,20	58.284,79
3	Kehutan	188.052,30	4.039,59	88.754,08	109.063,59	99.248,69	116.677,17	179.794,85	8,00	6.307,44
4	Migas	-	-	-	-	-	966.416,51	-	-	-
5	Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	99.977,87	11.995.202,30	-	-	-	-
6	Penggalian	357.953,17	4.300,00	12.212,60	7.014,56	13.237,06	8.499,24	6.786,78	7.829,14	5.685,09
	Jumlah	357.953,17	11.211,62	156.050,80	254.295,40	12.157.527,71	1.307.709,09	344.667,27	31.411,10	72.668,88

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka 2000.

Tabel 5.7. Ketersediaan Infrastruktur Menurut Kabupaten Tahun 2000

Kabupaten	Bandara		Dermaga		Panjang Jalan Aspal	Sarana Komunikasi		Kantor Bank
	Panjang/Lebar	Kekuatan	Panjang/Lebar	Daya(Ton)		Sentral Telepon	Sambungan Telepon	
Merauke	1850/30	F-28	74/12	2.500	807,30	3	4.608	17
Jayawijaya	1650/30	F-27	-	-	235,30	1	1.896	5
Jayapura	2180/45	B-737/400F	132/9	3.000	709,60	3	2.302	14
Paniai	1400/30	F-27	102/12	2.000	220,12	-	3.715	3
Fak-Fak	660/20	DHC-6	100/12	3.000	237,27	2	2.785	14
Sorong	1650/30	F-28	160/22	3.000	309,91	2	8.707	16
Manokwari	1650/30	F-27	73/14	3.000	576,94	4	4.459	16
Yapen Waropen	650/20	DHC-6	70/8	700	175,25	1	1.923	5
Biak Numfor	3570/45	B-747	140/13	3.000	556,57	2	4.433	10

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka 2000

c. Ketersediaan Infrastruktur antar Kabupaten.

Infrasruktur fisik tentu saja sangat penting bagi dunia usaha dan industri. Sektor swasta biasanya memiliki keinginan-keinginan, baik yang bersifat khusus maupun umum dan persyaratan tertentu untuk lingkungan fisik.(Lincoln Arsyad,1999:311).

Tabel 5.7 memberikan gambaran mengenai ketersediaan infrasruktur menurut kabupaten di Propinsi Papua. Indrastruktur yang ditampilkan disini adalah seperti bandar udara; dermaga/pelabuhan kapal laut; panjang jalan aspal; sarana komunikasi(sentral telepon) dan lembaga keuangan(bank). Dari 9(sembilan) kabupaten di Papua, terdapat tiga kabupaten masing-masing, Jayawijaya, Paniai, dan Yapen Waropen yang nampaknya ketersediaan infrasruktur kurang memadai dibandingkan dengan 6(enam) kabupaten lainnya.

5.1.6. Implikasi Hasil Penelitian.

Dengan diterimanya hipotesis dalam penelitian ini maka model alokasi investasi dari Rahman Takayama (RT) menjadi relevan untuk menjelaskan masalah disparitas alokasi investasi daerah di Propinsi Papua, dimana tingkat tabungan ,incremental capital output ratio (ICOR) dan suku bunga mempengaruhi alokasi investasi daerah di Propinsi Papua pada periode 1986 – 2000.

Logika dari model yang digunakan disini adalah dalam aktivitas investasi swasta dimana ketersediaan sumber pendanaan dan produktivitas daerah berpengaruh dalam pengambilan keputusan pengusaha. Tersedianya

jumlah tabungan masyarakat yang berbeda antar daerah/kabupaten diduga terjadi karena adanya perbedaan kondisi infrastruktur dan minimnya ketersediaan pendanaan investasi perbankan di Papua yang mendukung sektor keuangan. Alokasi investasi di daerah oleh pihak swasta terbukti dipengaruhi oleh ketersediaan dana tabungan masyarakat di daerah setempat.

Dari nilai t hitung variabel suku bunga, dapat dilihat bahwa variabel tersebut secara individu mampu menjelaskan secara nyata variabel investasi pada derajat 5 persen. Dari tanda koefisiennya, koefisien suku bunga memiliki tanda negatif, yang berarti bahwa tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh secara negatif terhadap permintaan investasi swasta di Propinsi Papua.

Banyak ekonom pengikut Keynes yang menekankan bahwa tingkat suku bunga bukan merupakan variabel kritis dalam menentukan permintaan investasi. Menurut mereka yang menjadi variabel kritis adalah variabel yang menentukan keuntungan yang diharapkan dan dikenal sebagai "*Marginal Efficiency of Investment*" Mereka berpendapat bahwa permintaan investasi adalah inelastis terhadap tingkat bunga. Hal ini berarti bahwa perubahan tingkat bunga membawa perubahan kecil pada permintaan investasi. Landasan pemikirannya adalah bahwa keuntungan yang diharapkan dari adanya investasi akan menurun dengan cepat jika tingkat bunga meningkat. Tetapi permintaan investasi diperkirakan akan berubah apabila faktor-faktor lain selain tingkat bunga mengalami perubahan. (Iswardono, 1990:35).

Faktor lainnya yang sangat diperlukan meliputi kajian tentang kondisi fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis ekonominya, termasuk

tentang sumber daya fisik (pertambangan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya) serta ketersediaan infrastruktur merupakan pemicu bagi tujuan investasi. Pemerintah daerah perlu memperhatikan masalah lingkungan fisik dan infrastruktur fisik yang tentu saja sangat penting bagi dunia usaha dan industri sehingga dapat memenuhi keinginan investor.

5.2. Disparitas Spasial.

Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran tentang disparitas (ketimpangan) pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di Propinsi Papua. Bahwa untuk melihat ketimpangan yang terjadi penulis menggunakan data pendapatan perkapita antar kabupaten dan untuk menghitung ketimpangan secara agregat (Propinsi) digunakan indeks ketimpangan yang pertama kali digunakan oleh *J.G Williamson*, atau yang lebih dikenal dengan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah semakin mendekati satu angka indeksnya, semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin mendekati angka nol semakin kecil tingkat ketimpangan.